

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 32 PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMEGANG
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Manyuro Marinier Abraham

NIM : 93 2114 039

NIRM : 930051121303120037

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2000**

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 32 PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMEGANG
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Manyuro Marinier Abraham

NIM : 93 2114 039

NIRM : 930051121303120037

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2000**

S k r i p s i

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 32 PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)

Oleh:

Manyuro Marinier Abraham

NIM : 932114039

NIRM : 930051121303120037

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dra. Fr. Ninik Yudianti., M.Acc.

Tanggal 22 Juni 2000

Pembimbing II



Drs. H. Suseno TW., M.S.

Tanggal 7 Agustus 2000

Skripsi

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 32 PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMEGANG
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)
STUDI KASUS PADA PT. BELANTARA PERSADA SAMARINDA**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Manyuro Marinier Abraham

NIM : 932114039

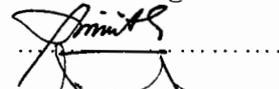
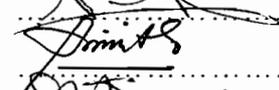
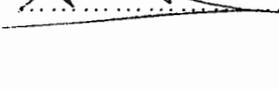
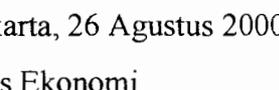
NIRM : 930051121303120037

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 8 Agustus 2000

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji:

| | Nama Lengkap | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc. |  |
| Sekretaris | Drs. E. Sumardjono, M.B.A. |  |
| Anggota | Dra. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc. |  |
| Anggota | Drs. H. Suseno TW., M.S. |  |
| Anggota | Drs. E. Sumardjono, M.B.A. |  |

Yogyakarta, 26 Agustus 2000

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dekan

Drs. H. Suseno TW., M.S.

Selamat pagi mimpi buruk, apa kabarmu hari ini. Istirahatlah engkau sekarang, terima kasih telah menjadi kawanku dan menjagaku semalam

Selamat pagi matahari terima kasih telah membangunkanku, jadilah penerangku di hari ini, meraih semua harapan demi kemuliaan alam semesta

Bila telah kulewati hari ini, langit senja menyapaku dengan senyum menyejukkan dan mengantarku pulang

Datanglah wahai birunya malam beserta bintang dan bulan melepaskan lelahku hari ini

Biarlah mimpi buruk dan indah menjadi sahabatku untuk menemani dalam perjalanan hidup

Kalian adalah pengalaman yang menjadi guruku, mengajarku untuk tetap bertahan dalam menghadapi kehidupan

Membimbingku dalam doa pada Sang Cinta Kasih

Blue Sky

Kupersembahkan skripsi sederhana ini kepada :
Allah Bapa di Surga yang telah memberikan Roh KudusNya
Bapak F. Purwanto dan Ibu Asteria. R (orang tua tercinta)
Adik-adikku yang kusayangi, Lia, Navy dan Yani
Ekta kecilku,..... Dathay Deyap

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 26 Agustus 2000

Penulis,



Manyuro Marinier Abraham

ABSTRAK

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 32 PADA PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)

Manyuro Marinier Abraham
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2000

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek akuntansi perusahaan pemegang HPHTI di Indonesia yaitu PT. Belantara Persada dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan PSAK No. 32.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuesioner, studi dokumentasi, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Belantara Persada telah menerapkan PSAK No. 32 dengan baik, tidak mengalami hambatan dalam penerapannya, membuat laporan keuangan untuk pajak dan akuntansi dan menerapkan standar akuntansi yang lain.

ABSTRACT
**THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD
BOARD NO. 32 IN THE COMPANY POSSESSING THE RIGHTS FOR
FOREST CULTIVATION FOR INDUSTRIAL PLANTS**

Manyuro Marinier Abraham
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2000

The objective of this research was to assess the accounting practice of the company possessing the rights for forest cultivation for industrial plants in Indonesia namely PT. Belantara Persada and then to identify the problems in the application of Financial Accounting Standard Board (FASB) No. 32.

The methods of data gathering were questionnaire, documentation, interview and observation methods.

The research problem result showed PT. Belantara Persada had applied the FASB No. 32, did not have any problem in applying the FASB No. 32, made financial report for tax and accounting, and also applied other accounting standards.

KATA PENGANTAR

Kemuliaan demi nama Allah bapa di surga dan terpujilah namanya diseluruh alam semesta. Manusia bisa berusaha namun Allah yang menentukan Demikian dengan kerendahan hati, puji dan syukur atas segala berkat dan karuniaNya hingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan terselesaikan. Penyusunan skripsi dengan judul “ Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 Pada Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)” ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasamadari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. F. Ninik Yudianti, M.Acc., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Suseno TW., M.S., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Dra. YFG. Agustinawansari MM. Ak., Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. E. Sumardjono, M.B.A., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.
5. Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberi nilai baik dan buruk.

6. Staff Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah dengan sabar membantu mahasiswa dalam urusan akademik.
7. Segenap Pegawai Universitas Sanata Dharma yang ramah.
8. Segenap jajaran PT. Segara Timber yang telah memberikan jalan dalam penulisan skripsi ini di perusahaan afiliasinya.
9. Segenap jajaran PT. Belantara Persada yang telah membantu dalam penulisan skripsi sehingga saya bisa lulus sebagai sarjana.
10. Teman-teman Kuliah angkatan '93 khususnya Pascalis, Dodiék, Bambang Kadir, Wenefrida, Ipunk, Agus, Erwin, cimot, Andang, My good nieces Hesti, Henny, Nur dan semua teman-teman dikelas A, serta Siyak dan Mimien.
11. Kawan-kawan di Argulo 12 A, Yustinus (Terima kasih atas bantuannya semoga Allah memberkatimu), Yoyok (kodok yang selalu tertawa), Ryan (Agus Khentus: "Langit tetap biru walau dilihat dari comberan"), Jhony 'Drosophila', Deni 'Kambas', Yosef, Nunus 'Gembul', Didik 'Kin Clong', Unggul and Freddy.
12. Terima kasih juga buat Noni, Ernie, Mayang dan mbak Ines serta seluruh keluarga Ekta yang telah memberikan perhatiannya.
13. Teman-teman dari PPM dan PPO serta Mahasiswa KKN angkatan XX.
14. Terima kasih kepada Civitas Akademika USD dan selamat datang dunia nyata.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka saran, kritikan dan saran bagi perbaikan akan diterima dengan terbuka dan senyum.

Yogyakarta, 26 Agustus 2000



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Pengertian Hutan..... | 10 |
| B. Pengertian Proses Produksi dan Hasil Hutan..... | 12 |
| C. Perusahaan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri..... | 13 |
| D. Konsep Dasar Penyusunan Laporan Keuangan..... | 15 |
| E. Keterbatasan Laporan Keuangan..... | 17 |
| F. Akuntansi Keuangan Perusahaan Pengusahaan Hutan..... | 19 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Laporan Keuangan Menurut Pola Umum..... | 19 |
| 2. Laporan Keuangan Mengacu Pada PSAK No. 32 | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 50 |
| A. Jenis Penelitian..... | 50 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 50 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 50 |
| D. Data yang Akan Dicari | 51 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| F. Variabel Penelitian | 52 |
| G. Hipotesis | 53 |
| H. Teknik Analisis Data | 54 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM | 56 |
| A. Sejarah Singkat dan perkembangan Perusahaan | 56 |
| B. Letak dan Luas Areal Lahan HTI..... | 57 |
| 1. Luas Areal..... | 57 |
| 2. Letak Areal | 58 |
| 3. Topografi | 60 |
| 3. Jenis Tanah..... | 61 |
| 4. Iklim..... | 61 |
| C. Struktur Organisasi | 62 |
| 1. Susunan Struktur Organisasi PT. Belantara Persada..... | 62 |
| 2. Tugas dan Tanggungjawab | 63 |
| D. Personalia | 68 |
| 1. Jumlah Tenaga Kerja..... | 68 |
| 2. Tingkat Pendidikan Tenaga kerja..... | 68 |
| 3. Fasilitas dan Tunjangan..... | 71 |
| E. Pendanaan dan Akuntansi Perusahaan..... | 71 |
| 1. Keuangan Perusahaan..... | 71 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Kebijakan Akuntansi | 72 |
| F. Proses Pembangunan Hutan Tanaman Industri..... | 74 |
| 1. Perencanaan..... | 75 |
| 2. Kegiatan Penanaman | 76 |
| 3. Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan | 78 |
| 4. Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan | 79 |
| 5. Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara..... | 79 |
| 6. Pemenuhan Kewajiban Terhadap Lingkungan Sosial | 80 |
| 7. Sarana dan Prasarana..... | 80 |
| G. Produksi..... | 80 |
| H. Pemasaran..... | 81 |
| BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..... | 82 |
| A. Deskripsi data | 82 |
| 1. Neraca | 82 |
| 2. Laporan Rugi Laba..... | 83 |
| 3. Laporan Arus Kas | 83 |
| B. Perbandingan Laporan Keuangan Perusahaan HTI Dengan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 32 | 89 |
| 1. Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK No. 32 | 89 |
| 2. Penerapan PSAK No. 32 Pada Laporan Keuangan PT. Belantara Persada..... | 94 |
| 3. Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Indutri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PT. Belantara Persada..... | 102 |
| 4. Perbandingan Laporan Keuangan PT. Belantara Persada dengan PSAK No. 32 Berdasarkan Hasil Kuesioner..... | 105 |
| C. Analisis Perbedaan dan Persamaan antara Laporan keuangan PT. Belantara Persada dengan PSAK No. 32 | 118 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Perbedaan antara Laporan Keuangan Perusahaan | |
| Dengan PSAK No. 32 | 118 |
| 2. Persamaan antara Laporan Keuangan Perusahaan | |
| Dengan PSAK No. 32 | 120 |
| D. Deskripsi dan Analisis Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh | |
| Perusahaan dalam Menerapkan PSAK No. 32 | 120 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 122 |
| A. Kesimpulan..... | 122 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 123 |
| C. Saran-Saran..... | 124 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 Neraca | 47 |
| Tabel 2 Laporan Harga Pokok Produksi..... | 48 |
| Tabel 3 Rugi Laba | 49 |
| Tabel 4 Jumlah Tenaga kerja PT. Belantara persada..... | 69 |
| Tabel 5 Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja PT. Belantara persada | 70 |
| Tabel 6 Dasar Penyusutan Aktiva Tetap..... | 73 |
| Tabel 7 Neraca PT. Belantara Persada..... | 85 |
| Tabel 8 Laporan Rugi Laba PT. Belantara persada..... | 87 |
| Tabel 9 Laporan Arus Kas PT. Belantara persada..... | 88 |
| Tabel 10 Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK No. 32 | 91 |
| Tabel 11 Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PT. Belantara persada | 104 |
| Tabel 12 Perbandingan Laporan Keuangan PT. Belantara persada dengan Peraturan PSAK No. 32 | 112 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Peta HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada..... | 59 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Belantara Persada | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia memiliki hutan yang sangat luas di kawasan Asia Tenggara. Luasnya hutan yang dimiliki ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melancarkan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Dilihat dari sudut geografisnya hutan di Indonesia dijuluki hutan tropis karena tumbuh di daerah tropis dan bersifat heterogen yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kayu yang dihasilkan bermacam-macam antara lain: Jati, meranti, keruing, kamper, bengkirang, agathis dan kayu ramin. Sedangkan hasil-hasil hutan yang digolongkan sebagai hasil hutan ikutan meliputi: sirap, arang, kayu dapur, bambu, damar, rotan, gondorukem, tarpentin, minyak kayu putih, benang sutra dan tengkawang. Hasil hutan yang terpenting ialah kayu, yang merupakan bahan baku bagi berbagai jenis industri. Istilah “konsumsi kayu” Berarti konsumsi bagi industri-industri tersebut akan kayu gergajian (*sawtimber*), kayu lapis (*plywood*), papan partikel (*particle board*), bubur kertas (*pulp*), kertas, termasuk kertas karton dan meubeler (*furniture*)(Dumairy 1997:218).

Dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, antara lain pemanfaatan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang masing-masing pelaksanaannya berdasarkan pasal 13 dan pasal 14

Undang-Undang Pengusahaan Kehutanaan (UUPK), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1970 Jo PP Nomor 28 Tahun 1985 dan PP Nomor 7 Tahun 1990 (Bambang Pamulardi 1996:119-120). Kegiatan Pemanfaatan hutan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru adalah eksploitasi hutan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kegiatan Industri Kehutanan lainnya, obyek wisata serta pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup.

Pengolahan hasil hutan oleh industri-industri dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara pengusahaan HTI, untuk pelaksanaannya, pemerintah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada badan usaha negara, swasta dan koperasi. Pengusahaan HTI tersebut diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam Bab II pasal 2 tentang Tujuan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1990:318), pengusahaan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk:

1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah devisa.
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

Perusahaan-perusahaan yang memiliki hak pengusahaan HPHTI memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan laba. Nilai ekspor kayu yang menduduki peringkat kedua setelah minyak bumi membawa keuntungan yang besar, yang

diperoleh dari pemanfaatan kayu hasil hutan. Keuntungan besar yang diperoleh akan mendorong terjadinya penebangan secara liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Penebangan besar-besaran dapat merusak ekosistem hutan. Untuk melindungi hutan dari perusakan ini, pemerintah mengatur pemanfaatan atau pengusahaan hutan dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut diwujudkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1990:72-75), Konservasi sumber daya alam tersebut dilakukan pemerintah melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemerintah dalam pelaksanaannya menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah penyangga kehidupan, menetapkan pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Bagi setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan yaitu pemegang HPH atau HPHTI di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak

pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Tindakan penertiban oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan penertiban yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan F.A (*Forestry Agreement*) atau SK. HPH yang berisi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menteri Pertanian untuk melaksanakan pengusahaan hutan atau suatu areal kerja pengusahaan hutan, dalam F.A tersebut pemegang HPH atau HPHTI memiliki hak dan kewajiban melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta pengelolaan areal HPH atau HPHTI yang meliputi fungsi perencanaan pengusahaan hutan, pengorganisasian perusahaan dalam pendayagunaan teknis kehutanan dan tenaga profesional pendukung pengusahaan hutan, pelaksanaan pengusahaan hutan, perlindungan, pengawasan dan pengamanan hutan. Kewajiban perusahaan terhadap F.A menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekologi modern.

Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan harus dikelola secara terencana sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal, berkesinambungan dan lestari. Pengelolaan secara optimal, berkesinambungan dan lestari telah dirintis oleh Departemen Kehutanan sejak beberapa tahun silam.

Pemerintah selain mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan diterbitkannya dokumen F.A yang

melandasi cara kerja perusahaan agar sesuai ketentuan, guna mencegah terjadinya perusakan hutan. maka cara lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah melalui pemberian HPH/HPHTI secara selektif, agar pemanfaatan hutan diolah secara baik oleh perusahaan yang profesional.

Mengingat sumbangan yang diberikan oleh hasil hutan terhadap devisa negara dan untuk tetap menjaga kelestarian hutan dituntut suatu pengelolaan yang profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggungjawaban yang baik dan menghasilkan informasi yang relevan serta berguna bagi pengambilan keputusan ekonomis.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi dan alat pertanggungjawaban. Laporan keuangan haruslah disusun berdasarkan suatu standar akuntansi tertentu agar terdapat keseragaman dalam penyusunan dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, pemilik perusahaan atau dan calon pemilik perusahaan, Kreditur dan calon kreditur, pemerintah, karyawan dan masyarakat. Standar Akuntansi untuk kehutanan disusun berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 32 (PSAK No. 32).

Kekhususan di bidang pengusahaan hutan seperti siklus produksi yang panjang, keragaman sivikultur yang digunakan, hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku menyebabkan adanya ketidakseragaman penyajian informasi akuntansi pada perusahaan-perusahaan yang sejenis (Pemegang

HPH/HPHTI) sehingga diperlukan suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Kehutanan.

Standar akuntansi keuangan yang selama ini diatur masih bersifat umum maka laporan keuangan yang dihasilkan belum seragam. Berlakunya akuntansi kehutanan pada semua perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan hutan diharapkan terdapat keseragaman laporan keuangan agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi perusahaan akuntansi kehutanan masih tergolong baru, tentunya ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan akuntansi kehutanan (PSAK No. 32) atau belum dalam laporan keuangannya dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan akuntansi kehutanan dan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan laporan keuangan yang disusun dengan mengacu pada PSAK No. 32 dengan laporan keuangan yang disusun dengan pola umum. Karena laporan keuangan kehutanan memiliki arti penting dan memiliki kekhususan tersendiri maka penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Penerapan PSAK No. 32 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Pemegang HPHTI”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penulisan diatas maka dapat kita ketahui bahwa keberadaan PSAK No. 32 sangat berpengaruh bagi perusahaan perusahaan hutan khususnya perusahaan-perusahaan pemegang HPHTI, oleh karena itu penulis bermaksud meneliti laporan keuangan perusahaan pemegang HPHTI, serta untuk menjaga agar penelitian ini tetap pada koridornya, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan pemegang HPHTI.
2. Penulis meneliti laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, rugi laba dan cash flow serta catatan atas laporan keuangan, penulis tidak mengkhususkan pada perbedaan laporan keuangan yang dibuat perusahaan untuk laporan pajak.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan perusahaan pemegang HPHTI sudah mengacu pada PSAK No. 32?
2. Apakah ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh perusahaan dalam penerapan PSAK No.32?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktek akuntansi perusahaan pemegang HPHTI di Indonesia Khususnya di PT. Belantara Persada dalam menerapkan PSAK No. 32 tentang akuntansi kehutanan.
2. Mengetahui ada atau tidak hambatan-hambatan yang ditemui perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 32 tentang Akutansi Kehutanan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian bagi perusahaan untuk mengetahui manfaat dari penerapan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 32.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan mengenai akuntansi kehutanan bagi sivitas akademika.

3. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan sebagai syarat menempuh ujian sarjana dan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

F. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini dijelaskan tinjauan teoritis yang ada hubungannya dengan akuntansi kehutanan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini diuraikan sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aspek pemasaran, aspek personalia, aspek keuangan dan akuntansi.

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini data yang diperoleh dianalisis berdasarkan landasan teori yang digunakan oleh penulis.

BAB VI. KESIMPULAN dan SARAN

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari pembahasan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan

Pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, kawasan hutan, pembagian hutan, fungsi hutan dan pembagian hutan berdasarkan keadaannya atau peruntukannya menurut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Himpunan Peraturan Perundang-undangan republik Indonesia 1989: 2491-2492) ialah: Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Hasil-hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan seperti kayu perkakas, kayu industri, bambu, rotan, satwa buru, satwa elok dan lain-lain. Kehutanan adalah kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya seperti pengukuran hutan, penataan hutan, pemungutan hasil hutan, pemasaran hasil hutan, pengolahan hasil hutan, penelitian, pendidikan dan lain-lain. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Berdasarkan kepemilikannya Menteri yang disertai urusan Kehutanan menyatakan hutan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hutan negara yaitu kawasan hutan dan hutan yang tidak dibebani hak milik.
2. Hutan milik yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Berdasarkan fungsinya menteri menetapkan hutan negara sebagai:

1. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
2. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan produksi dan ekspor.
3. Hutan suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:
 - a. Hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan disebut “Cagar Alam”.
 - b. Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional disebut “Suaka Margasatwa”.
4. Hutan wisata adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dipelihara dan dibina guna kepentingan pariwisata dan atau wisata buru, yaitu:
 - a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan disebut “Taman Wisata”.

- b. Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi disebut “Taman Buru”.

Berdasarkan keadaan atau peruntukan, hutan dibedakan menjadi tiga:

1. Hutan tetap yaitu hutan yang berada di dalam kawasan hutan.
2. Hutan cadangan yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan.
3. Hutan lain seperti hutan tanaman industri yaitu hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

B. Pengertian Proses Produksi dan Hasil Hutan

Proses produksi untuk mendapatkan hasil hutan bagi pemegang HPH ialah dari hutan alam yang masih produktif dengan silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) yang memerlukan rotasi penebangan selama 35 tahun. Bagi pemegang HPHTI hasil hutan diperoleh dari hutan tanaman. Daur tanaman ditetapkan sesuai dengan kelas perusahaan atau jenis tanaman yang akan diusahakan,

untuk tanaman *fast growing* daur ekonomis paling cepat 6 tahun dan tanaman *slow growing* paling cepat selama 8 tahun.

Pengertian hasil hutan berdasarkan penjelasan UU No. 5 Tahun 1967 adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan berupa: (1) Hasil-hasil hutan seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan didalam kawasan hutan, termasuk hasil yang berupa minyak. (2) Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain, hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.

C. Perusahaan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Perusahaan pemegang HPH memiliki hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan. Perusahaan pemegang HPHTI mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pengelolaan dan pemasaran.

Perusahaan yang dapat mengajukan permohonan HPHTI untuk mengelola hutan adalah Perusahaan Pemerintah (BUMN) dengan nama Perum Perhutani dimana

dalam perkembangannya telah berdiri lima perusahaan (Bambang Pamulardi 1996:121-122), yaitu:

1. PT. Inhutani I yang dibentuk berdasarkan PP No. 21 Tahun 1972, dengan wilayah kerja di Kalimantan Timur.
2. PT. Inhutani II yang dibentuk berdasarkan PP No. 34 Tahun 1974, dengan wilayah kerja di Kalimantan Tengah.
3. PT. Inhutani I yang dibentuk berdasarkan PP No. 31 Tahun 1974, dengan wilayah kerja di Kalimantan Selatan.
4. PT. Inhutani I yang dibentuk berdasarkan PP No. 22 Tahun 1991, dengan wilayah kerja Sumatera Bagian Utara meliputi Aceh, Medan, Padang dan Riau.
5. PT. Inhutani I yang dibentuk berdasarkan PP No. 23 Tahun 1991, dengan wilayah kerja Palembang, Lampung, Bengkulu dan Jambi.

Selain Perum Perhutani adalah Perusahaan Swasta Nasional atau Asing yang telah berbentuk Badan Hukum dan Koperasi.

Wewenang pemberian HPHTI adalah Menteri Kehutanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jangka waktu 35 tahun ditambahkan daur tanaman pokok yang diusahakan dan dapat diperpanjang. Setiap pemohon HPHTI sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/95 Tanggal 6 Februari 1995 wajib menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) HTI yang merupakan satu kesatuan dengan penyusunan Studi Kelayakan.

Lokasi HTI adalah areal dalam kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif dan tenaga kerja yang dipekerjakan diwajibkan diambil dari tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi syarat menurut Menteri Kehutanan dibidang perencanaan, *silvikultur* dan pengelolaan hutan. Sedangkan luas areal yang dapat dikerjakan dalam kegiatan HPHTI maksimal 30.000 Hektar (Ha) untuk Industri *pulp* dan minimal 60.000 Ha untuk Industri pertukangan dan Industri lainnya.

D. Konsep Dasar Penyusunan Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan menguraikan dua konsep dasar yaitu dasar Akrual dan Kelangsungan Usaha (PSAK 1995:8-9).

1. Dasar Akrual (*Accrual Basis*)

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara dengan kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi yang terjadi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan

peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Konsep dasar yang lain menguraikan mengenai Kesatuan Usaha dan Unit Moneter (Sugiri 1995:15-19).

1. Dasar Kesatuan Usaha (*Bussines Entity base*)

Konsep kesatuan usaha menyatakan bahwa kejadian-kejadian ekonomi dapat diidentifikasi ke kesatuan pertanggungjawaban tertentu. Asumsi ini mensyaratkan bahwa kegiatan-kegiatan kesatuan usaha itu diselenggarakan terpisah dari:

- (a) Kegiatan-kegiatan pemiliknya.
- (b) Semua kegiatan-kegiatan kesatuan usaha lainnya.

2. Dasar Unit Moneter (*Monetary unit base*)

Konsep unit moneter mensyaratkan bahwa hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam satuan uang sajalah yang dimasukkan dalam catatan akutansi. Konsep ini melarang informasi yang sebenarnya relevan seperti kesehatan pemilik,

kualitas jasa dan moral pegawai untuk dimasukkan dalam catatan akuntansi karena informasi ini tidak dapat dinyatakan dalam satuan uang. Dukungan terhadap konsep ini terletak pada kenyataan bahwa satuan uang adalah relevan, sederhana dan dapat dipahami.

E. Keterbatasan Laporan Keuangan

Bagaimanapun besarnya manfaat laporan keuangan pemakai harus memahami keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan agar dalam membacanya tidak menimbulkan salah tafsir. Keterbatasan-keterbatasan laporan keuangan ialah sebagai berikut (Harahap 1997:137-138):

1. Laporan historis

Laporan keuangan bersifat historis ialah merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan bersifat umum

Akuntansi keuangan menyajikan informasi yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umum berbagai kelompok pemakai, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

3. Taksiran dan pertimbangan

Proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari penggunaan berbagai taksiran dan berbagai pertimbangan.

4. Materialitas

Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dapat dilaksanakan, jika hal tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.

5. Konservatisme

Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif lainnya yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

6. Substansi mengungguli bentuk

Substansi atau hakekat mengungguli bentuk ialah laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas).

7. Alternatif

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.

8. Kualitatif

Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikualifikasikan umumnya diabaikan.

9. Istilah teknis

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.

F. Akuntansi Keuangan Perusahaan Pengusahaan Hutan

Akuntansi keuangan yang dibuat oleh perusahaan pengusahaan hutan khususnya pemegang HPHTI dilihat dari susunan laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama laporan keuangan yang disusun menurut pola umum, kedua laporan keuangan yang disusun dengan mengacu kepada PSAK No. 32.

1. Laporan Keuangan Menurut Pola Umum

Laporan keuangan menurut menurut pola umum terdiri dari karakteristik kualitatif laporan keuangan, tujuan, ruang lingkup, dan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu:

a. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu (PSAK 1995: 1-27) :

1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi

dan bisnis, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar

2) Relevan

Informasi yang bermanfaat harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Material

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Informasi dipandang material apabila informasi yang dipakai dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

3) Keandalan

Informasi akan memiliki manfaat apabila memiliki keandalan (*realible*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan.

Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari yang seharusnya digambarkan bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi peristiwa tersebut.

Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan tidak selalu harus konsisten dengan bentuk hukumnya.

Netralitas

Informasi yang diberikan harus diarahkan pada kebutuhan pemakai secara umum. Tidak boleh menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara pihak lain yang berlawanan dirugikan.

Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya mengalami ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan

prakiraan dalam kondisi ketidakpastian. Pertimbangan sehat tidak memperkenankan adanya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu, tidak memiliki keandalan.

Keandalan

Informasi yang dapat diandalkan adalah informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4) Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan, dan dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Karena pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

5) Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Apabila informasi yang disajikan tepat waktu tetapi transaksi atau peristiwa lain belum diketahui akan mengurangi keandalannya. Demikian juga sebaliknya semua aspek diketahui dengan penyajian informasi tidak tepat waktu, informasi menjadi tidak bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan.

Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala persuasif daripada karakteristik daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Para penyusun dan pemakai laporan keuangan harus menyadari kendala ini.

Keseimbangan Karakteristik kualitatif

Keseimbangan atau *trade-off* diantara berbagai karakteristik kualitatif seringkali diperlukan. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.

6) Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar informasi semacam itu.

b. Tujuan

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Laporan keuangan mungkin tidak dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam

pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.

c. Ruang Lingkup

Ada empat pembahasan dalam ruang lingkup kerangka dasar ini yaitu: pertama membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*, yang selanjutnya hanya disebut “laporan keuangan), termasuk didalamnya laporan keuangan konsolidasi. Kedua membahas tentang karakteristik yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, ketiga mengenai definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan terakhir membahas mengenai konsep modal serta pemeliharaan modal. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segment industri, dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

d. Unsur-unsur Laporan Keuangan Pola Umum

Unsur-unsur laporan keuangan menurut pola umum terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yaitu:



1) Neraca

Unsur keuangan ini terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas.

a) Aktiva

Definisi Aktiva menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 49 (a) adalah sumber keuangan yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara dengan kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Aktiva dapat dibedakan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain.

Aktiva Lancar adalah aktiva yang dapat direalisasikan atau dipergunakan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama, seperti kas dan bank, surat-surat berharga yang mudah dijual dan tidak untuk dimaksudkan untuk ditahan, deposito jangka pendek, wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, uang muka pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak dimuka dan biaya dibayar dimuka yang akan menjadi beban dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca (PSAK No. 9 Par. 9 1994: 9.10-9.11).

Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang akan digunakan

dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Biasanya aktiva tetap akan mengalami penyusutan, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah uang yang dapat disusutkan dari satu aktiva sepanjang masa manfaat, sedangkan jumlah yang dapat disusutkan (*Depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya (PSAK No. 16 Par. 55: 16.9).

Aktiva Lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi atau penyertaan, maupun aktiva tidak berwujud seperti aktiva tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham dan beban ditangguhkan serta aktiva lancar lainnya (PSAK No. 16 Par. 55: 16.19)

b) Kewajiban

Kewajiban berdasarkan definisi Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 49 (b) adalah merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi .

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*). Pelunasan kewajiban dapat dilakukan dengan pembayaran kas (atau setara kas) dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal, penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan penyerahan aktiva lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban sendiri dapat dibedakan menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan kewajiban lain-lain.

Kewajiban Lancar adalah hutang perusahaan yang diharapkan dan dapat dilunasi dalam waktu satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau dengan menimbulkan hutang lancar lainnya, seperti pinjaman bank, hutang usaha, uang muka penjualan, hutang deviden dan kewajiban lancar lainnya (Arief Suadi 1995: 150).

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau hutang yang tidak memerlukan penggunaan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar guna pelunasannya, karena telah dibentuk dana khusus untuk guna melunasi utang tersebut (Arief Suadi 1994: 175).

Kewajiban Lain-lain adalah hutang yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang,

seperti pendapatan diterima dimuka, uang jaminan jangka panjang yang diterima dari langganan, hutang pada Direksi atau pada perusahaan afiliasi dan kewajiban lancar lainnya.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai tambahan modal disetor. Penyajian modal dalam neraca harus sesuai dengan akta pendirian perusahaan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.

2) Laporan Rugi Laba

Laporan rugi laba terdiri dari pendapatan dan beban.

a) Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 paragraf 06 dan 07 Pendapatan (*Revenue*) didefinisikan sebagai arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode tertentu bila arus kas tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal, yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri.

Pendapatan adalah penghasilan (*gain*) yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

b) Beban

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 78 Beban adalah mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktifitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Kerugian dapat timbul misalnya dari bencana kebakaran, banjir dan kerugian yang timbul dari pelepasan aktiva tidak lancar.

c) Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan bukan dari kegiatan normal usahanya, seperti pendapatan sewa gedung dan pendapatan bunga.

Beban Lain-lain adalah beban yang timbul dengan usaha untuk memperoleh pendapatan lain-lain atau kegiatan lain yang bukan kegiatan normal usahanya seperti biaya bunga, jasa bank dan biaya sewa.

3) Laporan arus kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Arus kas aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan contohnya penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, penghasilan jasa (*fees*), komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada karyawan, penerimaan dan pembayaran oleh perusahaan asuransi, pembayaran kas atau penerimaan kembali (*restitusi*) pajak penghasilan jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian aktivitas pendanaan investasi dan penerimaan atau pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang berhubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yaitu: pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain, penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain, uang muka pinjaman yang diasuransikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan) dan pembayaran kas sehubungan dengan *future contracts*, *option contracts*, dan *swap contracts* kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (*dealing on trading*), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

Aktivitas pendanaan adalah Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang

berasal dari Aktivitas pendanaan adalah penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman lainnya, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (*lesse*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (*finance lease*).

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin memampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan rugi laba. Dan mungkin pula mencukupi pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian dan mempengaruhi perusahaan dan setiap sumber biaya dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral).

2. Laporan Keuangan Mengacu Pada PSAK No. 32

Pernyataan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 32 terdiri dari karakteristik, tujuan, ruang lingkup dan unsur-unsur laporan keuangan harus disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk pernyataan yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan dibawah ini untuk pernyataan yang bersifat khusus perusahaan hutan.

a. Karakteristik Perusahaan Pengusahaan Hutan

Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari penanaman, pemeliharaan dan pemungutan, bergantung dari riap (*growth*) tegakan hutan yang ditentukan oleh rotasi atau daur tanaman. Untuk hutan alam dengan silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) diperlukan rotasi tebang 35 tahun. Sedangkan untuk hutan tanaman, daur ditetapkan sesuai dengan kelas perusahaan atau jenis tanaman yang diusahakan untuk *fast growing species*, daur ekonomis paling cepat 8 tahun. Pengertian hasil dalam pengusahaan hutan meliputi: (1) hasil tebangan, (2) hasil dahan, dan (3) hasil hutan lainnya. Setiap proses pengusahaan masing-masing hasil adalah spesifik dan memiliki karakteristik khusus. Proses pengusahaan dan jenis hasil juga saling berkaitan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan akuntansi kehutanan adalah terwujudnya pembakuan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan, seperti pemegang HPH/HPHTI, berdasarkan asas keterbukaan, sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak ekstern seperti instansi berwenang dan masyarakat. Dengan berlakunya akuntansi kehutanan dalam perusahaan yang berkaitan dengan pengusahaan hutan, maka diharapkan:

- 1) Terdapat keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan perusahaan hutan di Indonesia, sehingga mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan menjadi informatif bagi pihak ekstern yang tidak terlibat langsung dalam perusahaan .
- 3) Pemerintah akan dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan.

c. Ruang Lingkup Penerapan Akuntansi Kehutanan

Akuntansi kehutanan disusun dan diberlakukan bagi perusahaan yang menjalankan satu atau lebih kegiatan perusahaan hutan.

d. Laporan Keuangan Kehutanan

Laporan keuangan kehutanan terdiri dari neraca, rugi-laba dan catatan atas laporan keuangan.

1) Neraca

Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar. Aktiva diklasifikasikan menurut urutan likuiditas dan kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo. Komponen-komponen neraca harus disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat perusahaan hutan.

2) Laporan Rugi Laba

Harga pokok penjualan harus disajikan masing-masing untuk kayu tebangan dan kayu olahan.

e. Unsur-unsur Laporan Keuangan Kehutanan

Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang berlaku umum memiliki sedikit perbedaan dengan unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan akuntansi kehutanan (mengacu pada PSAK No. 32). Perbedaan tersebut terletak pada neraca, laporan rugi laba dan catatan atas laporan keuangan.

1) Neraca

Unsur-unsur neraca yang bersifat khusus yaitu persediaan, HTI dalam pengembangan, beban ditangguhkan, kewajiban dan ekuitas. Format laporan neraca dapat dilihat pada tabel 1 halaman 46.

a) Persediaan

Hasil hutan yang berada di TPN dan lokasi pengumpulan/penimbunan hasil hutan harus dibukukan sebagai persediaan.

Persediaan HTI dalam Pengembangan

Perusahaan Pengusahaan Hutan yang melakukan beberapa kegiatan perusahaan hutan termasuk HTI, harus menyajikan biaya yang ditangguhkan dalam pelaksanaan pembangunan HTI terpisah dari biaya ditangguhkan lainnya dalam akun tersendiri yaitu: "HTI dalam Pengembangan". Akun ini disajikan di neraca setelah aktiva lancar dan

sebelum aktiva tetap. Pada Hutan Tanaman Industri, biaya bunga pinjaman yang terjadi dikapitalisasi selama masa satu daur sebagai “HTI dalam Pengembangan” dan diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi.

b) Biaya Ditangguhkan

Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan perusahaan hutan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti biaya perolehan HPH termasuk Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), biaya penyusunan RKPH dan RKL dan biaya yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan dibukukan sebagai Biaya ditangguhkan, dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya. Biaya ditangguhkan harus disajikan tersendiri di neraca.

c) Kewajiban

Dalam Rangka Pengembangan HTI

Dana yang diterima oleh perusahaan selain untuk penyertaan modal disajikan sebagai bagian kewajiban.

Kewajiban Pengusahaan Hutan

Taksiran sisa kewajiban sehubungan dengan kewajiban penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, Bina Desa Hutan, *landscaping* dan upaya konservasi lainnya yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan harus dibukukan

sebagai kewajiban, dan disajikan sebagai bagian kewajiban lain-lain. Apabila jumlah kewajiban tersebut di atas tidak diketahui dengan pasti, kewajiban tersebut harus diestimasi dengan layak. Setiap akhir periode pelaporan, harus dilakukan evaluasi terhadap taksiran sisa kewajiban dan apabila perlu dilakukan penyesuaian terhadap taksiran sisa kewajiban tercatat. Penyesuaian tersebut harus dibebankan pada biaya produksi.

d) Ekuitas

Dana yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal untuk proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) disajikan sebagai bagian ekuitas.

2) Laporan Rugi Laba

Dalam laporan ini terdiri dari dua unsur yaitu pendapatan dan beban. Format laporan rugi laba dapat dilihat pada tabel 2 halaman 45 dan Harga Pokok Penjualan pada tabel 3 halaman 48.

a) Pendapatan

Pendapatan Operasional meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan, maupun hasil hutan lainnya. Pendapatan harus diakui dengan menggunakan dasar akrual.

b) Beban

Beban harus diakui dengan menggunakan dasar akrual. Harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti:

perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran dan pembinaan hutan, pemenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial, dan pembangunan sarana dan prasarana. Perlakuan akuntansi untuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi kayu tebang dan hasil hutan lainnya diatur sebagai berikut :

(1) Perencanaan

Biaya- biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) termasuk Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), biaya penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dikapitalisasikan secara terpisah sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasikan secara masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT dimasukkan sebagai biaya produksi dalam periode berjalan.

(2) Penanaman

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman bukan untuk diproduksi, misalnya penanaman untuk hutan lindung, disajikan sebagai beban lain-lain. Biaya yang timbul, sebagai akibat kegiatan perusahaan

hutan seperti: a) biaya penanaman kembali untuk jalur tebang yang telah diproduksi; b) biaya penanaman tanah kosong; c) biaya penanaman kiri-kanan jalan; d) *landscaping* dan e) biaya untuk upaya konservasi lainnya harus diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi, walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Jumlah estimasi kewajiban yang masih tersisa harus dievaluasi setiap akhir periode.

Penanaman Pada Hutan Tanaman Industri:

- (a) Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai “HTI dalam pengembangan” sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan selama biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode *unit of production*.
- (b) Apabila tersedia pohon siap tebang maka biaya tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

(3) Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

Biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dibebankan sebagai biaya produksi. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemeliharaan dan pembinaan hutan yang belum

dilaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban.

Pemeliharaan dan Pembinaan Pada Hutan Tanaman Industri:

- (a) Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dikapitalisasi dengan “HTI dalam pengembangan” sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan diamortisasi sejak penebangan dilakukan serta dibukukan selama biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode *unit of production*.
- (b) Apabila tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pembinaan hutan tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

(4) Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

Pengembangan atau pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembangunan menara api, pos siaga, pembuatan halaran api dan pengadaan mobil pemadam kebakaran, dikapitalisasi sebagai biaya ditanggung dan disusutkan selama masa manfaat maksimum sampai masa akhir konsesi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pengarahannya tenaga ,

penggunaan bahan dan perlengkapan serta premi asuransi kebakaran dibebankan sebagai biaya produksi. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan yang belum dilaksanakan pada tanggal neraca, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban. Beban yang timbul dibebankan sebagai biaya produksi pada periode berjalan secara aktual.

(5) Pemungutan Hasil Hutan

Biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan dibebankan sebagai biaya produksi.

(6) Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara

Kewajiban perusahaan perusahaan hutan terhadap negara antara lain meliputi kewajiban teknis dan kewajiban finansial. Kewajiban teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban finansial meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Iuran Hasil Hutan (IHH), Biaya pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH), Dana Reboisasi (DR), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) areal. Biaya yang berhubungan dengan penyusunan AMDAL, RPL, RKL dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan

diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial yang ditetapkan oleh pemerintah seperti IHH, DR, BPPHH, dan PBB areal, dibebankan sebagai biaya produksi dengan menggunakan dasar akrual.

(7) Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup Bina Desa Hutan/ Penbinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik bina desa hutan /PMDH dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi.

(8) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Biaya pembangunan jalan induk dan cabang dikapitalisasi dan disusutkan selama selama masa manfaatnya dan dibukukan sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan ranting dibebankan sebagai biaya produksi.

c. Beban Usaha

Pada Hutan Tanaman Industri Beban Umum dan Administrasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan dibukukan sebagai beban umum dan administrasi.

d. Beban Penghentian Produksi

Beban penghentian produksi yang disebabkan kejadian normal dan rutin seperti yang disebabkan karena keadaan cuaca atau musim, dibukukan sebagai biaya produksi. Beban penghentian produksi lainnya seperti yang disebabkan bencana alam atau kebakaran disajikan sebagai pos luar biasa.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, perusahaan perusahaan hutan wajib mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas laporan keuangan:

- a) Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan, penanaman tanah kosong dan usaha-usaha pelestarian alam lainnya.
- b) Pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan lainnya.
- c) Rincian luas area sisa hutan yang belum dikelola selama sisa masa manfaat HPH.
- d) Sisa umur Hak Pengusahaan Hutan.
- e) Klasifikasi aktiva tetap dan peruntukannya.
- f) Khusus untuk Hutan Tanaman Industri, diungkapkan realisasi luas tanaman pada periode berjalan dan akumulasinya.

- g) Susunan pemegang saham perusahaan serta penjelasan mengenai perubahan pemegang saham selama periode berjalan.
- h) Rincian pendapatan operasional dirinci menurut jenis kegiatan.
- i) Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti DR, IHH, BPPHH, IHPH dan iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri-kanan jalan utama, Bina Desa Hutan, *landscaping* dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut:
 - (1) Saldo awal.
 - (2) Penyisihan periode berjalan.
 - (3) Realisasi selama periode berjalan.
 - (4) Saldo akhir.
- k) Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan bina desa hutan dan biayanya.
- l) Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkan:
 - (1) Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya.
 - (2) Jenis jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya.
- m) Sehubungan dengan persediaan, maka harus diungkapkan sebagai berikut:

- (1) Dasar penentuan Harga Pokok.
- (2) Persediaan dikelompokkan antara lain berdasarkan kayu bulat, kayu olahan, barang dalam proses dan perlengkapan barang dalam gudang berupa bahan bakar, suku cadang dan lain-lain pada tanggal pelaporan.
- (3) Persediaan yang dijaminakan dan diasuransikan.

Tabel 1: Neraca

| PT. XYZ NERACA Per 31 Desember 199X | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiva Aktiva Lancar: Kas dan Bank Piutang Usaha Persediaan Jumlah Aktiva Lancar HTI HTI dalam Pengembangan Investasi Jangka Panjang Aktiva Tetap: Harga perolehan aktiva Akumulasi penyusutan Jumlah aktiva tetap Aktiva Lain-lain: Beban ditangguhkan Jumlah Aktiva Lain-lain | Rp XXX Rp XXX Rp <u>XXX</u> Rp XXX Rp XXX RP XXX RP XXX Rp XXX Rp <u>XXX</u> Rp XXX Rp <u>XXX</u> Rp XXX | Kewajiban dan Modal Kewajiban Lancar: Pinjaman Usaha Hutang Iuran Hasil Hutan Hutang Dana Reboisasi Hutang Pajak Hutang Deviden Jumlah Hutang Lancar Kewajiban Jangka Panjang: Hutang obligasi Hutang jangka panjang Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban lain-lain: Pendapatan diterima dimuka Kewajiban Pengusahaan Hutan Jumlah Kewajiban lain-lain Modal: Modal Saham Penyertaan Modal Saldo Laba(Rugi) Jumlah Modal | Rp XXX Rp XXX Rp XXX Rp XXX Rp <u>XXX</u> Rp XXX Rp XXX Rp XXX Rp <u>XXX</u> Rp XXX Rp XXX Rp <u>XXX</u> Rp XXX Rp XXX Rp XXX Rp <u>XXX</u> Rp XXX |
| Jumlah Aktiva | Rp XXX | Jumlah Kewajiban dan Modal | Rp XXX |

Tabel 2: R u g i - L a b a

| PT. X Y Z RUGI - LABA Per 31 Desember 199X | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Penjualan..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Harga Pokok Penjualan..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Laba (Rugi) Kotor..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Beban Usaha: | | |
| Beban Pemasaran..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Beban Umum dan Administrasi..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Total Beban Usaha..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Laba (rugi) Operasi..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Pendapatan Lain-lain: | | |
| Pendapatan Bunga..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Pendapatan Lain-lain..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Beban Lain-lain: | | |
| Biaya Administrasi Bank..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Beban Lain-lain..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Jumlah Beban lain-lain..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Total Pendapatan (Beban) Lain-lain..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Laba (Rugi) sebelum Pos Luar Biasa..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Pos Luar Biasa..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Pajak..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Laba (Rugi) Bersih..... | | Rp <u>XXXX</u> |

Tabel 3: Harga Pokok Penjualan

| PT. X Y Z HARGA POKOK PENJUALAN Per 31 Desember 199X | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Persediaan awal..... | | Rp XXXX |
| Biaya Produksi: | | |
| Biaya Perencanaan..... | Rp XXXX | |
| Biaya Penanaman..... | Rp XXXX | |
| Biaya Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan..... | Rp XXXX | |
| Biaya Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan.. | Rp XXXX | |
| Biaya Pemungutan Hasil Hutan..... | Rp XXXX | |
| Biaya Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara..... | Rp XXXX | |
| Biaya Pemenuhan Kewajiban Lingkungan Sosial..... | Rp XXXX | |
| Biaya Pembangunan Sarana dan Prasana..... | Rp <u>XXXX</u> | |
| Jumlah Harga Pokok Produksi..... | | Rp XXXX |
| Persediaan Akhir..... | | Rp <u>XXXX</u> |
| Harga Pokok Penjualan..... | | Rp XXXX |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang menggunakan atau mengambil data dari satu objek tertentu, kemudian masing-masing data dianalisis. Teknik analisis yang dipergunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian belum dapat ditarik sebagai generalisasi sehingga harus disesuaikan untuk kondisi yang berbeda.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. **Tempat penelitian:** PT. Belantara Persada, Jl. Gajah Mada No. 19, Samarinda, Kalimantan Timur.
2. **Waktu Penelitian:** bulan Agustus sampai bulan September 1999.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah bagian yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan antara lain: pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi dan kepala bagian administrasi.



2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah neraca, laporan rugi laba dan catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

D. Data Yang Akan Dicari

1. Sejarah berdirinya perusahaan.
2. Visi dan misi perusahaan.
3. Gambaran umum Perusahaan.
4. Laporan keuangan selama satu periode terakhir.
5. Kondisi secara umum untuk kemungkinan penerapan PSAK No. 32.
6. Hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 32.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden. Responden yang dimaksud adalah bagian akuntansi dan yang menjadi bagian responden sebanyak tiga orang. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang cukup berarti antara laporan yang disajikan oleh perusahaan dengan laporan menurut PSAK No. 32.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengutip data dari perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan dan laporan keuangannya.

3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data mengenai gambaran umum perusahaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 32.

4. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek dan perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperjelas serta untuk membuktikan kebenaran-kebenaran data yang telah diperoleh melalui metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Penelitian atas laporan keuangan terdiri dari komponen-komponen neraca, rugi laba dan catatan

atas laporan keuangan. Ketiganya merupakan unsur penting dalam penerapan PSAK No. 32 tentang akuntansi kehutanan.

G. Hipotesis

Sebelum dikeluarkannya standar akuntansi kehutanan, perusahaan perusahaan hutan pemegang HPH/HPHTI dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pola umum, karenanya laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan berbeda antara satu dengan yang lain sehingga dapat membingungkan pihak ekstern dan kurang informatif. Setelah dikeluarkannya standar akuntansi kehutanan (PSAK No. 32) diharapkan terdapat keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan lebih informatif bagi pihak ekstern dan pemerintah dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan. Dalam perkembangannya ternyata tidak semua perusahaan mampu menerapkan standar akuntansi kehutanan secara langsung dan penuh karena ditemui kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan. Tingkat penerapan akuntansi kehutanan setiap perusahaan akan berbeda antara satu dengan yang lain, kemungkinan ada perusahaan yang belum menerapkannya hingga sekarang, ada perusahaan yang menerapkannya secara bertahap dan ada yang menerapkannya secara langsung dan penuh. Untuk mengetahui hal itu maka penelitian ini dilakukan pada perusahaan perusahaan hutan pemegang HPHTI khususnya PT. Belantara Persada untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan standar akuntansi kehutanan.

H. Teknik Analisis Data

Deskriptif-analitis yaitu dikemukakannya konsep teoritis dan gambaran mengenai objek penelitian serta penyajian dari data hasil penelitian. Untuk menjawab permasalahan dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memaparkan hasil penelitian mengenai laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan rugi laba.
2. Mengumpulkan dan mengelompokkan rekening-rekening yang ada di neraca dan rugi laba serta perlakuannya menurut PSAK No. 32.
3. Mengumpulkan dan mengelompokkan rekening-rekening yang ada di neraca dan rugi laba serta perlakuannya menurut perusahaan dari hasil penelitian.
4. Membandingkan laporan keuangan hasil penelitian di perusahaan dengan laporan keuangan menurut PSAK No.32, dalam analisis ini dibuat tabulasi seperti dibawah ini untuk neraca dan rugi laba.

Contoh Tabel : Perbandingan Laporan Keuangan PT. Belantara Persada dengan Peraturan PSAK No. 32

| No | Rekening | Menurut Perusahaan | PSAK No. 32 |
|----|----------|--------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5. Menganalisis dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan menurut PSAK No. 32.

6. Menganalisis dan mendeskripsikan hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan.
7. Memaparkan hasil penelitian mengenai catatan atas laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan.
8. Memeriksa catatan atas laporan keuangan perusahaan dan membandingkannya dengan PSAK No. 32 untuk mengetahui penerapannya.

Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua maka langkah terakhir adalah menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

PT. Belantara Persada adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang merupakan perusahaan patungan antara PT. segara Timber dengan PT. Inhutani I (BUMN Kehutanan). PT. Belantara Persada didirikan di Jakarta berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah SH, No. 132 tanggal 28 Agustus 1992, No. 02-9514 HT 0101 Th. 1992. Pendirian perusahaan ini memiliki misi dan visi untuk meningkatkan sumber daya hutan yang berwawasan lingkungan dan bertujuan untuk membangun Hutan Tanaman Industri.

PT. Belantara Persada bergerak secara khusus dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pola transmigrasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 251/kpts-V/1992 Tanggal 21 Februari 1992, telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sementara. Luas lahan yang dikelola ialah 4.200 hektar terletak dalam kelompok hutan sungai Karangan-Sangkulirang, Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Kemudian berdasarkan SK. Menhut No. 779/Kpts-II/1997 areal HPHTI PT. Belantara Persada ditetapkan seluas \pm 17.500 hektar. Pola pembangunan perusahaan ini menerapkan pola HTI Transmigrasi yang pada dasarnya mengacu dan memenuhi kewajiban atas dasar keputusan:

1. SK. Mentrans No. KEP. 124/Men/1990 Tanggal 12 Januari 1990 tentang pola pemukiman dan pengembangan usaha transmigrasi.
2. Surat keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan No. SKB 81/Men/1990-376/Kpts-11/1990 Tanggal 28 Juni 1990 tentang pembangunan HTI pola transmigrasi.

Pembangunan HTI PT. Belantara Persada diarahkan pada kelas perusahaan kayu pertukangan untuk pemenuhan bahan baku industri mitra usaha PT. Segara Timber Co, Ltd, serta membantu terselenggaranya pemukiman transmigrasi melalui bentuk penyediaan lapangan kerja.

B. Letak dan Luas Areal Lahan HTI

Letak dan luas areal lahan HTI untuk pengusahaan hutan secara deskriptif dijelaskan dibawah ini dan dapat dilihat pada gambar 1: Peta HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada halaman 44.

1. Luas Areal

Areal HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada seluas 4.200 hektar sesuai dengan SK Menhut No. 13/Menhut/1992 dan SK. HPHTI-Transmigrasi sementara No. 251/Kpts-V/1992. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 1993 untuk dapat mendukung 300 kepala keluarga transmigran, areal tersebut dikembangkan luasnya menjadi 18.430 hektar dengan luas areal efektif tanam seluas 11.700 hektar. Perluasan lahan ini telah memperoleh rekomendasi

dari Gubernur Kepala Tingkat I Kalimantan Timur dengan Surat No. 552/977/Proda 2.2/Ek Tanggal 4 Januari 1995 dan persetujuan prinsip Menteri Kehutanan dengan surat No. 357/Menhut-IV/1995 Tanggal 9 Maret 1995, dan terakhir dengan SK. Menhut No.779/Kpts-II/1997 Tanggal 17 Desember 1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan HTI Transmigrasi kepada PT. Belantara Persada dengan ditetapkannya areal seluas \pm 17.500 hektar.

2. Letak Areal

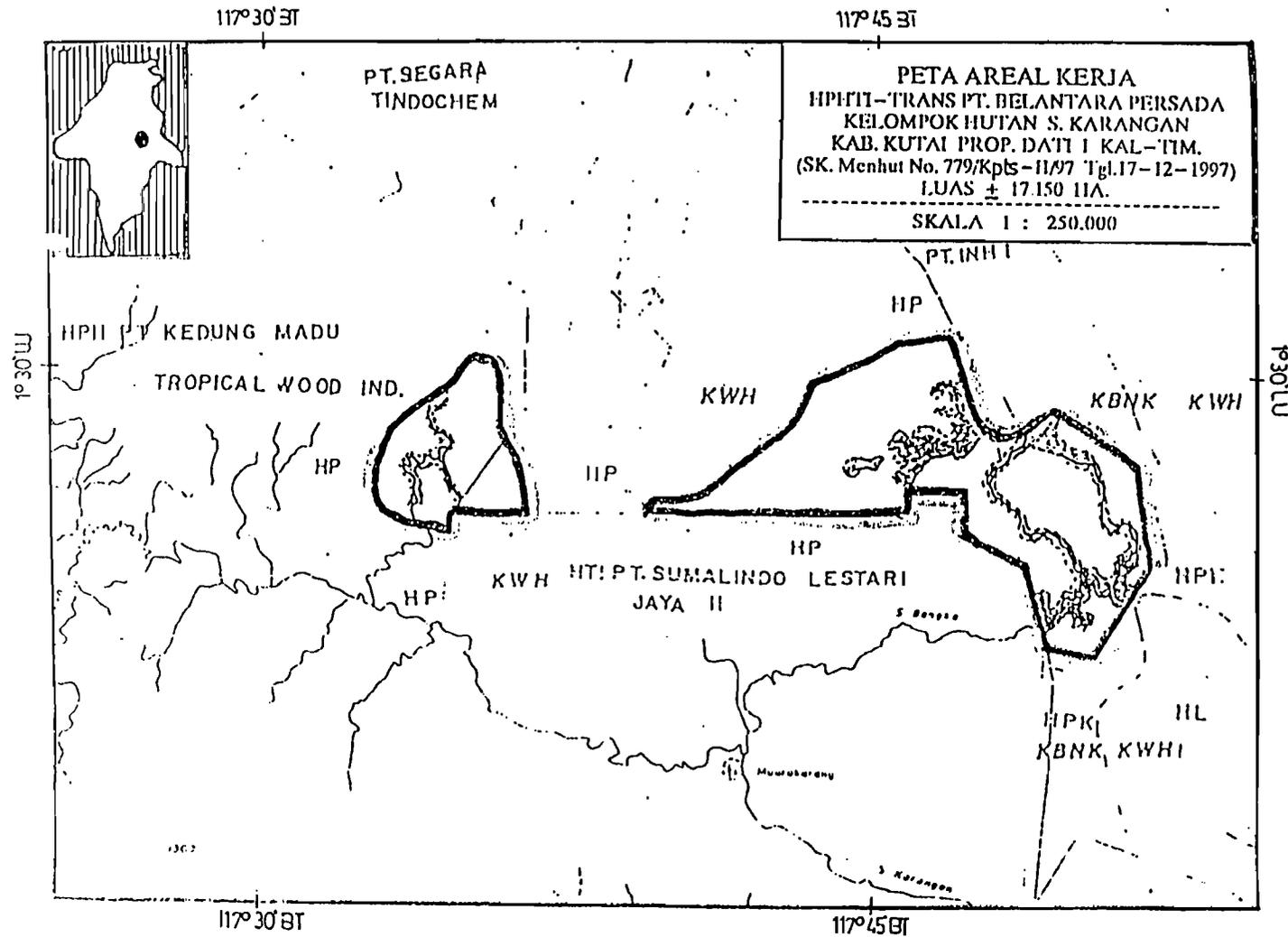
Letak areal HTI terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

a. Menurut Keadaan geografis

Secara geografis areal HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada secara keseluruhan berada pada posisi $1^{\circ}25'30''$ - $1^{\circ}33'40''$ Lintang Utara dan $117^{\circ}33'25''$ - $17^{\circ}52'19''$ Bujur Timur, secara spesifik berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara, Berbatasan dengan HPH PT. Segara Indochem sebagian dengan PT. Kedung Madu Tropical Wood dan HPH PT. Harapan Baru Bhakti. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan kawasan hutan produksi HPH PT. Gonpu dan PT Kedungmadu Tropical Wood dan HPH PT. Harapan Baru Bhakti.
- 2) Sebelah Timur, Berbatasan dengan kawasan hutan produksi PT. Segara Indochem dan HPH PT. Harapan Baru Bhakti. Sebelah Barat, Berbatasan dengan kawasan hutan produksi HPH PT. Kedungmadu Tropical Wood.

Gambar 1: Peta HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada



b. Menurut Administrasi Pemerintahan

Lokasi HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada secara keseluruhan termasuk dalam wilayah pemerintahan desa Karang (Brondongan) dan desa Lepoq, Kecamatan Sangkulirang, Daerah Tingkat II Kabupaten kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur.

c. Berdasarkan Pemangkuan Wilayah Hutannya

Lokasi ini termasuk ke dalam Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Batu Lepoq, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Muara Karang, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bontang-Sangkulirang, Dinas dan Kanwil Kehutanan Dati I Kalimantan Timur.

d. Menurut Wilayah Pemangkuan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kawasan calon HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada termasuk ke dalam wilayah DAS Karang.

3. Topografi

Berdasarkan peta garis bentuk skala 1:250.000 dari Jawatan Topografi tahun 1988 dan hasil pengamatan lapangan, kawasan HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada berkonfigurasi lapang (Topografi) cukup bervariasi mulai dari, yaitu:

- a. Datar, dengan kelerengan rata-rata 0%-8% pada kisaran ketinggian 50-150 meter dari permukaan laut.
- b. Landai, dengan kelerengan rata-rata 8%-15% pada kisaran ketinggian 100-200 meter dari permukaan laut.

- c. Agak curam, dengan kelerengan rata-rata 15%-25% pada kisaran ketinggian 150-250 meter dari permukaan laut.
- d. Pada tempat-tempat tertentu juga dijumpai areal topografi curam, terutama pada tempat-tempat relatif terjal yang membentuk punggung-punggung lipatan, namun jumlahnya relatif kecil pada ketinggian ± 300 meter dari permukaan laut, dengan kelerengan lebih dari 25%.

4. Jenis Tanah

Berdasarkan peta tanah eksplorasi Kalimantan Timur skala 1:1000.000 tahun 1978 dari Lembaga Penelitian dan Pemupukan Tanah Bogor, jenis tanah di areal utama HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada kelompok hutan sungai Karang, di dominasi oleh jenis tanah *Podzolik* merah kuning dan asosiasi *Podzolik* merah kuning dengan bahan induk batuan endapan, berfisiografi dataran hingga bergelombang ringan yang dicirikan oleh kesarangan tanah yang cukup tinggi.

5. Iklim

Menurut Schmidt dan Ferguson di areal utama HTI Transmigrasi PT. Belantara Persada kelompok sungai karangan memiliki bulan basah ($ch > 100$ mm) sebanyak sebelas bulan atau sebesar 148,81 mm dan tanpa bulan kering ($ch > 60$ mm), berdasarkan perhitungan maka kawasan ini termasuk tipe iklim A (cukup basah).

C. Struktur Organisasi

1. Susunan struktur organisasi PT. Belantara Persada

Susunan struktur organisasi PT. Belantara Persada ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa pada tanggal 29 Januari 1993, kemudian ditetapkan dengan SK. Direksi No. 153/BP/XII/1994. Bentuk struktur organisasi perusahaan berdasarkan hasil RUPS tersebut adalah lini dan staf yang dilandasi hubungan personal secara vertikal, horizontal dan diagonal yang harmonis. Bagian-bagian dari struktur organisasi tersebut meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Kepala Unit HTI (Manajer Area). Dewan Komisaris terdiri dari komisaris umum dan komisaris, sedangkan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Produksi dan Direktur Umum dan Keuangan. Direktur Utama membawahi Direktur Produksi, Direktur Umum dan Keuangan, Manajer Area dan SPI. Direktur Produksi membawahi Kepala Biro Penyusunan Program dan Kepala Biro Produksi. Direktur Umum dan Keuangan membawahi Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Keuangan. Untuk Manajer Perencanaan dan Penelitian-Pengembangan, Manajer Persemaian, Manajer Penanaman dan Pemeliharaan dan Kepala Tata Usaha dipimpin oleh Manajer Area. Untuk lebih lengkapnya lihat gambar 2: Struktur Organisasi PT. Belantara Persada halaman 63.

SK. Direksi tersebut juga memuat dan menetapkan uraian *job description* mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer Area, Kepala Biro, Staf

Pelaksana dan Supervisor Lapangan. Pengisian formasi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional dalam rangka efisiensi tanpa mengorbankan sasaran.

2. Tugas dan Tanggungjawab

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

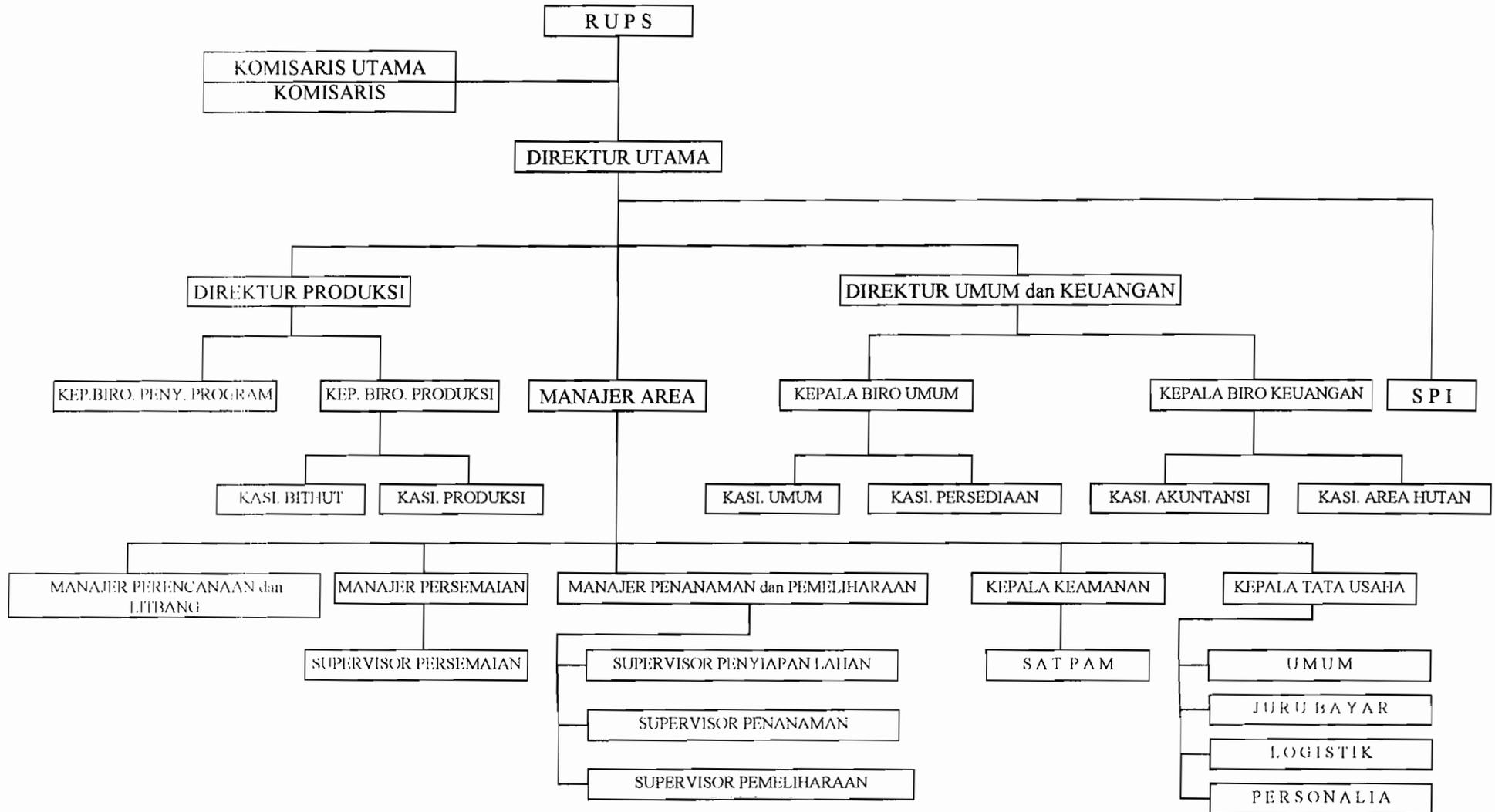
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi.
2. Melakukan tugas-tugas secara khusus yang ditentukan menurut anggaran dasar.

b. Direktur Utama

Dengan berlandaskan tugas, tanggungjawab dan wewenang Direksi, Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Memimpin perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional pembangunan dan perusahaan hutan.
2. Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam Direksi.
3. Memberikan pengarahan umum dan mengkoordinasikan kegiatan operasional Dewan Direksi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Dirut bertanggungjawab kepada pemegang saham perusahaan.

Gambar 2: Struktur Organisasi PT. Belantara Persada
 Sumber : Laporan kegiatan Usaha PT. Belantara Persada Tahun 1997



b. Direktur Utama

Dengan berlandaskan tugas, tanggungjawab dan wewenang Direksi, Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Memimpin perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional pembangunan dan perusahaan hutan.
2. Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam Direksi.
3. Memberikan pengarahan umum dan mengkoordinasikan kegiatan operasional Dewan Direksi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Dirut bertanggungjawab kepada pemegang saham perusahaan.

c. Direktur Umum dan Keuangan

Tugas dan tanggungjawab Direktur Umum dan Keuangan, Yaitu:

1. Memimpin dan menyelenggarakan fungsi umum dan keuangan yang meliputi keamanan, administrasi, personil dan logistik.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan teknis bidang administrasi dan keuangan, pengamanan personil, material dan fasilitas serta informasi.
3. Menyusun rencana kebutuhan personil untuk keperluan organisasi perusahaan serta meningkatkan profesionalisme, membina karier, penetapan gaji dan hasil lainnya guna membina kesejahteraan dan moral karyawan.
4. Menyusun rencana dan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, menyelenggarakan administrasi keuangan perusahaan, melaksanakan

pembayaran dan pengendalian penggunaan dana dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Umum dan Keuangan dibawah koordinator Direktur Utama.

d. Satuan Pengawas Intern

Tugas dan wewenang Satuan Pengawas Intern, yaitu:

1. Merumuskan bahan dan membuat konsep operasional pengawasan bidang teknik, administrasi dan keuangan.
2. Menyusun konsep pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik dilapangan serta dukungan administrasinya.
3. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan administrasi keuangan.
4. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Direksi disertai saran dan pertimbangan tindak lanjut.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

e. Direktur Produksi

1. Merencanakan, meyiapkan dan meyelenggarakan proses pembangunan dan pengusahaan HTI yang meliputi RKPH, RKL dan RKT.
2. Menyusun rencana dan merumuskan pola pembangunan dan pengusahaan HTI serta upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kayu.
3. Menyusun perkiraan sasaran tanam dan produksi.

4. Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan penebangan, sesuai dengan perkiraan kebutuhan pasar dan sasaran yang ditetapkan.
5. Mengawasi dan mengendalikan operasi pembangunan dan pengusahaan HTI.
6. Menyusun dan mengolah data penyelenggaraan pembangunan dan pengusahaan HTI.
7. Merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penelitian dan pengembangan.
8. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Produksi dibawah koordinator Direktur Utama.

f. Pembantu Direksi

1) Staf Pusat

Sebagaimana layaknya suatu organisasi perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dibantu oleh beberapa staf perusahaan. Staf pelaksanaan dikantor Direksi adalah sataf atau pejabat yang membantu Direksi dalam menyusun kebijaksanaan dan strategi pembangunan dan pengolahan hutan, menyusun rencana kegiatan serta mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional. Staf pelaksana dipusat meliputi:

- a) SPI Audit.
- b) Kepala Biro Penyusun Program.
- c) Kepala Biro Produksi.
- d) Kepala Biro Keuangan.

e) Kepala Biro Umum.

2) Staf Operasional Lapangan

Staf Operasional lapangan dipimpin oleh seorang Manajer Area yang bertugas melaksanakan pembangunan HTI dan bertanggungjawab kepada Dewan Direksi, Manajer Area membawahi:

- a) Manajer Perencanaan dan Litbang.
- b) Manajer Persemaian.
- c) Manajer Penanaman dan Pemeliharaan.
- d) Kepala Keamanan.
- e) Kepala Tata Usaha.

D. Personalia

1. Jumlah Tenaga kerja

Jumlah Personil PT. Belantara Persada sampai dengan Desember 1997 sebanyak 54 orang, terdiri dari pimpinan dan staf di kantor Dewan Samarinda sebanyak 7 orang, Dewan Komisaris dan Staf di Jakarta 4 Orang dan Staf Pelaksana dilapangan sebanyak 42 orang (lihat tabel 4: Jumlah Tenaga Kerja PT. Belantara Persada, hal. 67).

2. Tingkat Pendidikan Tenaga kerja

Tingkat Pendidikan pegawai berdasarkan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah menengah Umum, Sekolah Pertanian

Menengah Atas, Sekolah Kehutanan Menengah Atas, Ahli Madya pertanian, Ahli Madya Kehutanan, Sarjana hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Kehutanan, Sarjana Pertanian dan setingkat Sarjana Strata Dua (Lihat tabel 5: Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja PT. Belantara Persada, hal. 68).

Tabel 4: Jumlah Tenaga Kerja PT. Belantara Persada

| No | Uraian | s/d Desember 1996 (orang) | Masuk Tahun 1997 | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Masuk (orang) | Keluar (orang) | Jumlah (orang) |
| 1 | Pengurus | 5 | - | - | 5 |
| 2 | Kepala Biro | 2 | - | - | 2 |
| 3 | Manajer Area (Kepala Unit HTI) | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Senior Staf | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Satuan Pengawas Intern | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Manager | 3 | - | 1 | 2 |
| 7 | Supervisor | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Paramedis | 1 | 1 | - | 1 |
| 9 | Pembantu Pengawas Lapangan | 10 | - | - | 10 |
| 10 | SATPAM | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Pekerja Harian Tetap | 21 | - | - | 21 |
| 12 | Pengemudi | 2 | - | - | 2 |
| 13 | Pembantu Umum | 2 | - | - | 2 |
| | Jumlah | 53 | 3 | 2 | 54 |

Tabel 5: Tingkat Pendidikan Tenaga kerja PT. Belantara Persada

| NO | Uraian | Jumlah (orang) |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1 | Sarjana Ekonomi Strata 2 (S2) | 1 |
| 2 | Sarjana Srata 1 (S1): | |
| | - Sarjana Kehutanan | 5 |
| | - Sarjana Pertanian | 1 |
| | - Sarjana Ekonomi | 1 |
| | - Sarjana Hukum | 1 |
| 3 | Ahli Madya: | |
| | - Ahli Madya Kehutanan | 2 |
| | - Ahli Madya Pertanian | 1 |
| 4 | Sekolah Kehutanan Menengah Atas | 1 |
| 5 | Sekolah Pertanian Menengah Atas | 2 |
| 6 | Sekolah Menengah Umum | 22 |
| 7 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 10 |
| 8 | Sekolah Dasar | 7 |
| | Jumlah | 54 |

3. Fasilitas dan Tunjangan Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. Belantara Persada memperoleh gaji dan upah diatas Upah Minimum Regional (UMR) serta uang lembur yang memadai. Perusahaan juga menyertakan tenaga kerjanya ke program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JamSosTek), untuk hari tuanya pada saat pensiun tenaga kerja akan memperoleh uang pensiun. Selain itu perusahaan memberikan tunjang-tunjangan berupa: tunjangan kesehatan karyawan beserta keluarganya, tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan kelayakan bagi karyawan tetap yang bekerja dilapangan dan Tunjangan Hari Raya.

E. Pendanaan dan Akuntansi Perusahaan

1. Keuangan Perusahaan

Biaya satuan pembangunan HTI berpedoman pada SK. Menhut Tanggal 25 Juli 1995 Nomor 3/Kpts-II/1995 sebesar Rp 2.630.500,- per hektar. Dengan biaya satuan tersebut perusahaan memberikan skala prioritas penggunaan dana dititik beratkan pada keperluan operasional seperti upah kerja dan material, sedang prioritas berikutnya adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung langsung kegiatan operasional HTI.

Sumber dan proporsi pendanaan pembangunan HTI tahun 1998, mengacu pada SK. Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan RI No. 0533/KMK-017/1994 dan No. 496/Kpts-II/1994 Tanggal 24 Oktober 1994 tentang ketentuan

penyertaan modal negara Republik Indonesia dan pinjaman yang berasal dari Dana Reboisasi dalam pembangunan HTI sebagai berikut:

- a) Equity PT. Segara Timber (Penyertaan Modal Swasta) = 21,0%
- b) Equity PT. Inhutani I (Penyertaan Modal Pemerintah) = 14,0%
- c) Pinjaman Dana Reboisasi bunga 0% = 32,5%
- d) Pinjaman komersial = 32,5%

sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Kehutanan, sumber pendanaan pembangunan HTI untuk tahun 1998 hanya akan menggunakan dana dari tiga sumber, yaitu: Penyertaan Modal Swasta (PMS), Penyertaan Dana Pemerintah (PMP) dan Dana Reboisasi (DR).

2. Kebijakan Akuntansi

Beberapa kebijaksanaan akuntansi perusahaan akuntansi PT. Belantara Persada dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pedoman akuntansi yang berlaku dan digunakan PT. Belantara Persada sejak tahun 1995 ialah standar akuntansi No. 32 (PSAK 32).
- b) Mulai tahun 1995 telah dilakukan penyesuaian terhadap semua biaya yang sifatnya pra operasional dan diakui mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan cukup material, dikelompokkan ke dalam aktiva lain-lain sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Khususnya untuk aktiva lain-lain berupa usaha perolehan HPHTI, diterapkan penyusutan jangka waktu tiga tahun, sesuai dengan pedoman PSAK No. 6,

tentang perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan. Besarnya amortisasi tersebut pada HTI dalam pengembangan.

- c) Semua beban dalam rangka pembangunan HTI akan diakumulasikan menjadi nilai-nilai perolehan akun HTI dalam pengembangan, termasuk biaya direktorat Umum dan Keuangan pada daur pertama dan diamortisasikan selama masa konsesi (35 tahun) dimulai sejak penebangan pertama dan dibuku sebagai biaya produksi dengan menggunakan metode garis lurus.
- d) Metode pencatatan setiap jenis persediaan dilakukan berdasarkan metode fisik, sedang metode penilaian digunakan metode FIFO.
- e) Aktiva tetap berupa bangunan, peralatan dan jalan atau jembatan yang digunakan dalam usaha, pencatatan nilainya berdasarkan harga perolehan.
- f) Dasar penyusutan aktiva tetap menurut Undang- Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 pasal 11, dimana aktiva tetap dikelompokkan berdasarkan tarif penyusutan saldo menurun sebagai berikut:

Tabel 6 : Dasar Penyusutan Aktiva Tetap

| Kelompok | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan |
|----------------------|--------------|------------------|
| Peralatan atau Mesin | 4 - 8 Tahun | 25 % |
| Jalan HTI | < 10 Tahun | 10 % |
| Bangunan | > 10 Tahun | 10 % |

- g) Biaya penyusutan aktiva tetap di bebaskan pada HTI dalam Pengembangan selama daur pertama, sedangkan pada daur kedua dan seterusnya akan dibebankan pada biaya produksi.

- h) Beban pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dalam jumlah besar dikapitalisasikan dengan menambah harga perolehan.
- i) Dasar pencatatan yang ditetapkan pada pendapatan dan beban adalah metode akrual.
- j) Dasar menentukan besarnya pajak penghasilan adalah laba kena pajak berdasarkan laporan rugi laba setiap akhir tahun.
- k) Perusahaan tidak melakukan penunggakan pajak (*deffered tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

F. Proses Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Proses Pembangunan Hutan Tanaman Industri pola Transmigrasi PT. Belantara Persada pada areal yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan No. 779/Kpts-II/1997 tanggal 17 Desember 1997, tentang Ketentuan Mengenai Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT. Belantara Persada. Proses pembangunan HTI adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

a. Penyusunan Studi Kelayakan Hutan (*Foresty Study*) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sebelum memulai kegiatan pengusahaan hutan perusahaan harus menyusun mengenai Studi Kelayakan dan AMDAL tentang areal hutan yang akan dikerjakan, manfaat yang akan diperoleh dimasa yang akan datang, dampak dari pembangunan HTI terhadap lingkungan dan usaha pelestarian lingkungan yang akan dilakukan perusahaan.

b. Usaha Perolehan HPHTI

Perusahaan yang mengusahakan hasil hutan diharuskan memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dalam hal ini PT. Belantara Persada mengusahakan hutan untuk Tanaman Industri (HTI) maka hak pengusahaan hutannya adalah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Untuk memperoleh HPH ini perusahaan diwajibkan membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), menyusun Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH), Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT).

c. Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)

Perusahaan diwajibkan membayar IHPH yang dibayarkan satu kali pada saat ijin pengusahaan hutan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



d. Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)

Perusahaan diwajibkan menyusun Rencana Karya Pengusahaan Hutan selama masa konsesi HPHTI atau disebut rencana jangka panjang perusahaan yang harus disahkan oleh Departemen Kehutanan.

e. Penyusunan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL)

Perusahaan menyusun rencana kerja setiap lima tahun sekali yang merupakan penjabaran dari RKPH yang dituangkan dalam Rencana Kerja Lima Tahunan. RKT ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

f. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan berisi rencana kegiatan-kegiatan perusahaan dalam satu tahun mendatang, RKT dapat berisi rencana kegiatan lanjutan dan baru atau kegiatan untuk merealisasikan rencana yang belum selesai.

2. Kegiatan Penanaman

a. Pengadaan Bibit

Kegiatan perusahaan dalam menghasilkan kayu untuk dapat memenuhi industri pengolahan kayu tidak terlepas akan kebutuhan bibit berkualitas baik. Pengadaan bibit oleh perusahaan dapat dilakukan dengan dengan menyiapkan benih dan bibit dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui Lembaga Pusat Persemaian Permanen yang letaknya tersebar di seluruh Indonesia, atau perusahaan mengadakan benih unggul berlabel dan atau benih berasal dari pohon plus. Bibit yang dihasilkan untuk ditanam perusahaan adalah *Gmelina*

Arborea, Acasia Mangium (tergolong tumbuhan *slow growing*), sengon, karet dan meranti (tergolong tanaman *fast growing*).

b. Persemaian Bibit

Bibit yang telah diperoleh kemudian ditempatkan dan disiapkan dilahan persemaian disekitar areal strategis HTI sebelum masa penanaman. Kemudian bibit tersebut diseleksi, untuk mendapatkan bibit yang baik dan sehat seleksi bibit telah dimulai pada saat bibit dipindahkan dari bedeng ke poly bag atau poly tube. Bibit siap tanam akan dibawa ke lahan masih harus diseleksi lagi.

c. Pembukaan Lahan (*land clearing*)

Pembersihan lahan dari pohon-pohon yang tidak produktif agar siap untuk ditanami dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tebas imas, penebangan atau penebasan untuk pohon berdiameter dibawah 30 centimeter .
- 2) Penebangan, penebangan atau penebasan untuk pohon berdiameter diatas 30 centimeter.
- 3) Cincang Jalur Bersih, pohon yang telah ditebang kemudian dipotong-potong dengan ukuran maksimal 2 meter.
- 4) Rumpuk Jalur Kotor, setelah dicincang pohon-pohon tersebut kemudian dipinggirkan pada jalur yang telah disediakan agar ada ruang untuk penanaman pohon produktif.

pembukaan lahan harus sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh perusahaan dan telah ditetapkan oleh Departemen kehutanan.

d. Penanaman

Penanaman ditetapkan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah dibuat perusahaan. Penanaman didahulukan pada areal kosong dan atau semak belukar, penanaman harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya seperti pemasangan ajir, jarak tanam dan ukuran lobang tanaman tanpa meninggalkan azas manfaat, kelestarian dan lingkungan.

4. Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

Perusahaan melaksanakan pemeliharaan tanaman dengan cara penerapan *silvikultur* untuk menstimulasikan pertumbuhan tanaman dengan menentukan tempat tumbuh dan ruang optimal, mencegah serangan hama dan penyakit. Pemeliharaan dilaksanakan dengan cara, yaitu:

- 1) Kegiatan pemeliharaan tahun berjalan atau tahun pertama, kegiatan ini meliputi penyulaman, pemupukan dan penyiangan awal.
- 2) Pemeliharaan tahun kedua, kegiatan ini lanjutan pemeliharaan tahun pertama dengan kegiatan pokok penyiangan terhadap persaingan gulma pesaing tanaman pokok.

- 3) Pemeliharaan tahun ketiga, kegiatan ini lebih memperhatikan pada tujuan kualitas tegakan dengan cara pemangkasan dan penyiangan pohon pengganggu.
- 4) Pemeliharaan lanjutan tahun pertama, kegiatan utamanya adalah melakukan penjarangan pertama untuk memberikan ruang tumbuh terhadap tanaman pokok.
- 5) Pemeliharaan lanjutan tahun kedua, merupakan kegiatan terakhir dalam pemeliharaan dan pembinaan hutan dengan melakukan penjarangan kedua untuk tujuan meningkatkan volume tanaman pokok.

4. Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

perusahaan menyediakan sarana pemantau dengan membangun menara pengawas dengan intensitas 500 buah per Ha Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Selain itu perusahaan membuat ilaran api selebar 6 meter sepanjang batas-batas tanaman dan batas anak petak. Perusahaan juga menyiapkan personil Satuan Pengamanan Penjaga Hutan.

5. Pemenuhan Kewajiban terhadap Negara

Perusahaan melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti pembayaran dana Reboisasi, Iuran Hasil Hutan, Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Iuran Wajib lainnya serta Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan kewajiban Pajak Lainnya.

6. Pemenuhan Kewajiban Terhadap Lingkungan Sosial

Perusahaan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar areal HPHTI tentang rencana kegiatan HTI, memberikan peluang kepada penduduk lokasi untuk melakukan tanaman tumpang sari, melibatkan masyarakat sekitar areal HTI dalam kegiatan *land clearing*, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman HTI. selain itu juga perusahaan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.

7. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana berupa pembangunan persemaian dilokasi areal HTI termasuk instalasi airnya, pembangunan *base camp* berupa mess bagi Manjer dan supervisor serta barak untuk asrama karyawan, pembanguan jalan induk, jalan cabang dan jalan ranting serta sarana dan prasarana lain yang menunjang pembangunan HTI.

G. Produksi

Pada saat ini perusahaan belum mulai berproduksi karena baru pada tahap awal penanaman atau disebut dengan daur pertama, perusahaan masih dalam tahap perkembangan. Perusahaan mulai berproduksi pada daur kedua tahun 2004. Saat itu perusahaan akan menghasilkan kayu dari tanaman *Acasia Mangium*, *Gmelina Arbrorea*, sengon, karet dan meranti. Hasil prouksi tersebut nantinya akan dibedakan

berdasarkan kualitas 1, kualitas 2 dan kualitas 3. Jumlah produksi tersebut perhektarnya diatas 20 meter per kubik.

H. Pemasaran

Hasil kayu PT. Belantara persada pemasarannya akan diutamakan ke perusahaan induk PT. Segara Timber yang merupakan industri pengolahan kayu. Apabila PT. Segara Timber kelebihan bahan baku kayu PT. Belantara Persada akan menjual sisa kayu tersebut pada perusahaan lain yang membutuhkan bahan baku kayu untuk industrinya dengan harga yang sesuai dengan harga pasar.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan PSAK No. 32 tentang akuntansi kehutanan oleh perusahaan pengusahaan hutan, khususnya perusahaan pemegang HPHTI, penelitian dilakukan di PT. Belantara Persada yang berlokasi di Kalimantan Timur. Penelitian ini mengambil data dari PT. Belantara persada berupa laporan keuangan selama satu periode. Laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui sejauh mana PT. Belantara Persada menerapkan PSAK No. 32 dalam laporan keuangannya. Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan laporan milik perusahaan dengan laporan keuangan menurut PSAK No. 32.

Berikut ini akan ditampilkan unsur-unsur penyusunan laporan keuangan PT. Belantara Persada, yaitu neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas.

1. Neraca

Neraca akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berisikan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban atau hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Neraca PT.

Belantara Persada disusun setiap akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (tabel 6: Neraca PT. Belantara Persada, hal.82-83).

2. Laporan Rugi Laba

Laporan rugi laba disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan rugi laba PT. Belantara Persada disusun setiap akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Dari laporan rugi laba tersebut diketahui keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya, hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban berarti perusahaan memperoleh laba, perusahaan dianggap berhasil dalam menjalankan operasinya karena pada umumnya tujuan pendirian perusahaan adalah memperoleh laba. Apabila pendapatan perusahaan lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan, berarti perusahaan dapat dikatakan gagal dalam menjalankan operasinya untuk mencapai tujuan (tabel 7: Laporan Rugi Laba PT. Belantara Persada, hal.84).

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas berisi data mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara dengan kas serta kebutuhan perusahaan dalam menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas merupakan informasi yang berguna bagi pemakai untuk menilai perusahaan dalam pengelolaan kas. Dalam

penyusunan arus kas untuk perusahaan pengusahaan hutan dengan perusahaan umum tidak memiliki perbedaan. Laporan arus kas disusun berdasarkan PSAK No. 2 tentang arus kas. Laporan Arus Kas PT. Belantara Persada disusun setiap akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (tabel 8: Laporan Arus Kas PT. Belantara Persada, hal. 85).

Tabel 7: Neraca PT. Belantara Persada

| PT. Belantara Persada | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------|
| N e r a c a | | | |
| Per 31 Desember 1997 | | | |
| AKTIVA | | | |
| I | Aktiva Lancar | | |
| | 1. Kas | Rp | 18.099.468,00 |
| | 2. Bank | Rp | 209.871.247,00 |
| | 3. Deposito | Rp | 0,00 |
| | 4. Piutang Karyawan | Rp | 36.191.784,00 |
| | 5. Persediaan | Rp | <u>26.783.227,00</u> |
| | | Rp | 290.945.726,00 |
| II | HTI Dalam Pengembangan | Rp | 3.932.193.119,86 |
| III | Aktiva Tetap | | |
| | 6. Bangunan | Rp | 125.687.110,00 |
| | 7. Jalan HTI | Rp | 370.693.150,00 |
| | 8. Mesin-mesin | Rp | 12.105.000,00 |
| | 9. Kendaraan | Rp | 202.650.000,00 |
| | 10. Instalasi Air | Rp | 4.232.500,00 |
| | 11. Inventaris Kantor | Rp | <u>15.717.000,00</u> |
| | | Rp | 398.084.760,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | Rp | <u>(152.327.927,32)</u> |
| | Nilai Buku | Rp | 245.756.832,68 |
| IV | Aktiva Lain-lain | | |
| | 12. Beban yang Ditangguhkan | Rp | 170.496.075,00 |
| | Akumulasi Amortisasi | Rp | <u>(51.714.695,33)</u> |
| | | Rp | 118.781.379,67 |
| | Jumlah Aktiva | Rp | <u>4.587.677.058,21</u> |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | |
| V | Kewajiban Lancar | | |
| | 1. Utang PT. Segara Timber | Rp | 287.971.865,06 |
| | 2. PPH Pasal 21 | Rp | 5.334.170,00 |
| | 3. Utang lain-lain | Rp | 0,00 |
| | 4. Biaya masih harus dibayar | RP | <u>288.791.310,00</u> |
| | | | 582.097.345,06 |

Lanjutan Tabel 7: Neraca PT. Belantara Persada

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----|-------------------------|
| | Saldo Pindahan | Rp | 582.097.345,06 |
| VI | Kewajiban Jangka Panjang | | |
| | 5. Kredit Dana Reboisasi | Rp | 1.230.569.000,00 |
| VII | Ekuitas | | |
| | 6. Uang muka modal disetor | Rp | 256.647.000,00 |
| | 7. Modal disetor | Rp | 2.690.588.000,00 |
| | 8. Laba (rugi) tahun-tahun lalu | Rp | (8.330.007,36) |
| | 9. Laba (rugi) tahun berjalan | Rp | (73.894.279,49) |
| | Jumlah Ekuitas | Rp | <u>2.775.010.713,15</u> |
| | Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | Rp | <u>4.587.677.058,21</u> |

Tabel 8: Laporan Rugi Laba PT. Belantara Persada

| PT. Belantara Persada | | |
|--------------------------------------------|----|-----------------|
| Laporan Rugi Laba | | |
| Per 31 Desember 1997 | | |
| <u>Hasil</u> | | |
| Penjualan | Rp | 0,00 |
| Harga Pokok Penjualan | Rp | 0,00 |
| Laba (Rugi) Bruto | Rp | 0,00 |
| <u>Beban Usaha</u> | | |
| Beban Pemasaran | Rp | 0,00 |
| Beban Umum dan Administrasi | Rp | 91.934.640,00 |
| Jumlah Beban Usaha | Rp | 91.934.640,00 |
| Laba (Rugi) Operasi | Rp | (91.934.640,00) |
| <u>Pendapatan (Beban) Lain-lain</u> | | |
| Pendapatan Lain-lain | Rp | 21.049.751,00 |
| Beban Pajak Giro/Deposito | Rp | (3.009.390,49) |
| | Rp | 18.040.360,51 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | Rp | (73.894.279,49) |
| Pajak Penghasilan | Rp | 0,00 |
| Laba (Rugi) Setelah Pajak | Rp | (73.894.279,49) |

Tabel 9: Laporan Arus Kas PT. Belantara Persada

| PT. Belantara Persada Laporan Arus Kas Per 31 Desember 1997 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| <u>Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Usaha</u> | | |
| - Kenaikan Modal | Rp | 546.183.000,00 |
| - Kenaikan Rugi | Rp | (73.894.279,49) |
| <u>Penyesuaian Laba Bersih ke Kas yang Diperoleh Dari Kegiatan Usaha</u> | | |
| - Penyusutan | Rp | 35.656.076,37 |
| - Amortisasi | Rp | 25.259.377,83 |
| - Penurunan (Penambahan) Deposito | Rp | 300.000.000,00 |
| - Penurunan (Penambahan) Piutang Karyawan | Rp | (22.452.796,00) |
| - Penurunan (Penambahan) persediaan | Rp | (7.778.507,00) |
| - Penurunan (Penambahan) Biaya yang Ditangguhkan | Rp | (787.231.747,12) |
| - Penurunan (Penambahan) Aktiva Lain-lain | Rp | (31.362.825,00) |
| - Penambahan (Penurunan) Hutang PT. Segara Timber Co. Ltd | Rp | 107.472.373,03 |
| - Penambahan (Penurunan) Hutang Pajak Pph 21 | Rp | (3.558.170,00) |
| - Penambahan (Penurunan) Hutang Lain-lain | Rp | (4.915.000,00) |
| - Penambahan (Penurunan) Biaya yang masih harus dibayar | Rp | <u>95.446.011,50</u> |
| Kas Bersih dari (untuk) Usaha | Rp | 178.823.514,12 |
| <u>Kegiatan Investasi</u> | | |
| - Pembelian Aktiva Tetap | Rp | <u>(64.450.000,00)</u> |
| Kenaikan (penurunan) Kas dan Bank | Rp | 114.373.514,12 |
| Kas dan Bank Awal Tahun | Rp | 113.597.200,88 |
| Kas dan Bank Akhir Tahun | Rp | 227.970.715,00 |

B. Perbandingan Laporan Keuangan Perusahaan HTI dengan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 32

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perbandingan laporan keuangan PT. Belantara Persada dengan laporan keuangan menurut PSAK No. 32. Sebelum dilakukan perbandingan antara laporan keuangan PT. Belantara Persada dengan laporan keuangan menurut PSAK No. 32 terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai beberapa hal berikut:

1. kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No. 32.
2. Uraian data dari jawaban kuesioner yang diterima dari PT. Belantara Persada.
3. Penyusunan kegiatan PT. Belantara Persada dan perlakuan akuntansinya berdasarkan hasil jawaban kuesioner.

Setelah penjelasan tersebut kemudian dilakukan perbandingan dalam bentuk tabulasi antara laporan keuangan PT. Belantara Persada dengan laporan keuangan menurut PSAK No. 32, kemudian dilakukan analisis dan deskripsi persamaan-perbedaan serta meneliti hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT. Belantara Persada.

1. Kegiatan Perusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK No. 32

Perusahaan perusahaan Hutan Tanaman Industri memiliki kegiatan-kegiatan pokok berbeda dengan perusahaan umum, demikian juga dengan

perlakuan akuntansinya juga berbeda dengan perlakuan akuntansi perusahaan umum. Berikut ini akan diuraikan dalam bentuk tabel mengenai kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri dan perlakuan akuntansinya yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan R.I. bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dalam buku petunjuk pelaksanaan laporan keuangan perusahaan hutan berjudul Laporan Akhir: Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan (tabel 9: Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya, hal. 85-86).

Tabel 10: Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK No. 32

| Nama kegiatan | Rincian Kegiatan | Perlakuan Akuntansi | Kelompok Rekening dalam lap. Keu. | Laporan keuangan |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PERENCANAAN | Penyusunan Studi Kelayakan | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Usaha Perolehan HPHTI | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Penyusunan Rencana Karya Lima Tahunan | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Penyusunan Rencana Karya Tahunan | Biaya Produksi | HPP | Laporan Rugi Laba |
| | | | | |
| PENANAMAN DALAM DAUR PERTAMA | Penanaman Hutan Alam | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Penanaman Hutan Lindung | Biaya Lain-lain | Biaya Lain-lain | Laporan Rugi Laba |
| | Penanaman Kembali Jalur Tebang | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Penanaman Tanah Kosong | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Penanaman Kiri-Kanan Jalan | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | <i>Landscaping</i> | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Kegiatan Konversi Lainnya | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | | | | |
| PENANAMAN DALAM DAUR BERIKUTNYA | Penanaman Hutan Alam | Biaya Produksi | Harga Pokok Penjualan | Laporan Rugi Laba |
| | Penanaman Hutan Lindung | Biaya Lain-lain | Biaya Lain-lain | Laporan Rugi Laba |
| | Penanaman Kembali Jalur Tebang | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| | Penanaman Tanah Kosong | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| | Penanaman Kiri-kanan Jalan | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| | <i>Landscaping</i> | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| | Kegiatan Konservasi lainnya | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| | | | | |
| PEMELIHARAAN DAN PEMBINAAN HUTAN DAUR PERTAMA | Persemaian | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Persiapan Lapangan | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Seleksi Pemindahan | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |

Lanjutan Tabel 10: Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK No. 32

| Nama kegiatan | Rincian Kegiatan | Perlakuan Akuntansi | Kelompok Rekening dalam lap. Keu. | Laporan keuangan |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PEMELIHARAAN | Persemaian | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| DAN PEMBINAAN HUTAN | Persiapan Lapangan | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| DAUR BERIKUTNYA | Seleksi Pindahan | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| PENGENDALIAN | Pembangunan Menara Api | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| KEBAKARAN DAN | Pembangunan Pos Jaga | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| PENGAMANAN HUTAN | Pembuatan Hilaran Api | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| | Pengadaan Mobil Kebakaran | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| | Pengerahan Tenaga | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| | Penggunaan Bahan dan Perlengkapan | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| | Premi Asuransi Kebakaran | Biaya Produksi & Kewajiban | HPP & Kewajiban Lancar | Laporan Rugi Laba & Neraca |
| PEMUNGUTAN HASIL HUTAN | Penebangan Kayu | Biaya Produksi | HPP | Laporan Rugi Laba |
| | Pengangkutan Kayu Tebangan | Biaya Produksi | HPP | Laporan Rugi Laba |
| | Penjualan Kayu Tebangan | Penjualan Kayu Tebangan | Penjualan | Laporan Rugi Laba |
| | Penyerahan Kepada IPKH | Penyerahan / Pengoperan | Rekening Antara | |
| PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA | <u>Pemenuhan Kewajiban Teknis</u> | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | - AMDAL | | | |
| | - Penyajian Evaluasi Lingkungan | | | |
| | - Rencana Kelola Lingkungan | | | |
| | - Rencana Pemantauan Lingkungan | | | |
| | <u>Pemenuhan Kewajiban Finansial</u> | Biaya Produksi | HPP | Laporan Rugi Laba |
| | - Pembayaran Iuran Hasil Hutan | | | |
| | - Pembayaran Pengukuran dan Pengujian HH | | | |
| | - Dana Reboisasi | | | |

Lanjutan Tabel 10: Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK No. 32

| Nama kegiatan | Rincian Kegiatan | Perlakuan Akuntansi | Kelompok Rekening dalam lap. Keu. | Laporan keuangan |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | - Pelunasan PBB Areal | | | |
| PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Studi Diagnostik Bina Desa Hutan | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Pelaksanaan Bina Desa Hutan | Biaya Produksi | HPP | Laporan Rugi Laba |
| | | | | |
| PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA | Pembangunan Jalan Induk | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| | Pembangunan Jalan Cabang | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| | Pembangunan Jalan Ranting | Biaya Produksi | HPP | Laporan Rugi Laba |
| | | | | |

2. Penerapan PSAK No. 32 Pada Laporan Keuangan PT. Belantara Persada

Pengajuan kuesioner pada PT. Belantara Persada adalah untuk mengetahui secara umum penyusunan laporan keuangan perusahaan dan sejauh mana perusahaan menerapkan PSAK No. 32 pada laporan keuangannya.

Berikut ini adalah uraian jawaban kuesioner yang diajukan berdasarkan unsur-unsur dari PSAK No. 32 sebagai berikut:

a. Neraca

1) Berhubungan dengan aktiva

1. Perusahaan telah mengelompokkan aktiva dalam urutan lancar dan tidak lancar.
2. Perusahaan telah mengklasifikasikan aktiva menurut urutan likuiditas.
3. Perusahaan belum membukukan hasil hutan yang berada di TPN dan pengumpulan atau penimbunan hasil hutan sebagai persediaan karena belum ada produksi.
4. Perusahaan telah menyajikan biaya yang ditangguhkan dalam pelaksanaan pembangunan HTI terpisah dari biaya yang ditangguhkan lainnya dalam akun tersendiri yaitu HTI dalam pengembangan.
5. Perusahaan telah menyajikan HTI dalam pengembangan di neraca setelah aktiva lancar dan sebelum aktiva tetap.
6. Perusahaan telah mengkapitalisasikan biaya bunga pinjaman selama masa satu daur sebagai HTI dalam pengembangan.

7. Perusahaan telah membukukan biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan hutan sebagai biaya ditangguhkan.

2) Berhubungan dengan Kewajiban dan Ekuitas

8. Perusahaan telah mengelompokkan kewajiban menurut urutan lancar dan tidak lancar.

9. Perusahaan telah mengklasifikasikan kewajiban menurut urutan likuiditas.

10. Perusahaan telah menyajikan dana yang diterima selain untuk penyertaan modal sebagai kewajiban.

11. Perusahaan tidak memiliki kewajiban penanaman kembali TPTI karena pola tanam HTI berbeda dengan HPH dengan menggunakan pola tanam TPTI.

12. Perusahaan telah menyajikan dana yang diterima sebagai penyertaan modal sebagai bagian ekuitas.

b. Rugi - Laba

1) Berhubungan dengan Pendapatan dan Beban

13. Perusahaan telah mengakui pendapatan dengan menggunakan dasar akrual.

14. Perusahaan belum menyajikan pendapatan operasional karena belum berproduksi.

15. Perusahaan belum menyajikan Harga Pokok Penjualan karena perusahaan baru mengadakan penanaman kayu, belum ada produksi kayu tebangan.
16. Perusahaan telah mengakui beban dengan menggunakan dasar akrual.
- 2) Berhubungan dengan Harga Pokok Produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti:
- a) Perencanaan
17. Perusahaan telah mengkapitalisi biaya-biaya yang berhubungan dengan HPH, termasuk IHPH, biaya penyusunan RKPH dan RKL secara terpisah sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi.
18. Perusahaan belum memasukkan RKT kedalam biaya produksi karena belum ada produksi, perusahaan memasukkannya ke dalam biaya HTI dalam pengembangan yang diakumulasi selama daur pertama atau masa penanaman. Biaya RKT akan disusutkan selama masa manfaat sebagai biaya produksi selama daur kedua atau masa produksi.
- b) Penanaman
19. Perusahaan belum memasukkan biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam ke dalam biaya produksi

melainkan ke dalam HTI dalam pengembangan karena belum ada produksi. pola penanaman HTI berbeda dengan pola penanaman HPH.

20. Perusahaan telah menyajikan biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman bukan untuk diproduksi seperti penanaman hutan lindung sebagai biaya beban lain-lain.
21. Perusahaan tidak mengestimasi dan memasukkan biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan perusahaan hutan seperti biaya penanaman kembali jalur tebang yang telah diproduksi, biaya penanaman tanah kosong dan kiri kanan jalan, landscaping dan biaya untuk usaha konservasi lainnya sebagai biaya produksi, karena pola HTI berbeda dengan pola HPH.
22. Pada HTI, jika tidak tersedia pohon siap tebang, perusahaan telah memasukkan biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai biaya HTI dalam Pengembangan.
23. Pada HTI, jika tersedia pohon siap tebang, perusahaan akan memasukkan biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman sebagai biaya produksi.

c) Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

24. Perusahaan belum memasukkan biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan sebagai biaya produksi melainkan sebagai biaya HTI dalam pengembangan selama daur

pertama karena belum ada produksi dan diamortisasi selama daur kedua selama masa manfaatnya, pola HTI berbeda dengan pola HPH.

25. Pada HTI, jika tidak tersedia pohon siap tebang, perusahaan telah memasukkan biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan sebagai HTI dalam pengembangan

26. Pada HTI, jika tersedia pohon siap tebang, perusahaan akan memasukkan biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan sebagai biaya produksi.

d) Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

27. Perusahaan telah mengkapitalisasi biaya pembangunan dan atau pengadaan sarana pengendalian dan pengamanan hutan sebagai biaya ditangguhkan dan disusutkan pada daur kedua atau masa produksi sebagai aktiva tetap.

28. Perusahaan belum memasukkan biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan sebagai biaya produksi, perusahaan memasukkannya pada biaya HTI dalam pengembangan, karena belum ada produksi.

29. Perusahaan telah mengestimasi kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan yang belum dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban.

e) Pemungutan hasil hutan

30. Perusahaan belum memasukkan biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan sebagai biaya produksi, karena belum ada produksi.

f) Pemenuhan kewajiban terhadap negara

31. Perusahaan telah mengkapitalisasi biaya yang berhubungan dengan AMDAL, RPL, RKL sebagai beban yang ditangguhkan dan akan diamortisasi selama masa manfaat sebagai biaya produksi.

32. Perusahaan belum mengkapitalisasi biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial kepada pemerintah sebagai biaya produksi, perusahaan membebankannya sebagai HTI dalam pengembangan, karena belum ada produksi.

g) Pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan sosial dan sosial

33. Perusahaan belum memasukkan biaya yang berhubungan dengan Studi Diagnostik Bina Desa Hutan atau PMDH sebagai beban yang ditangguhkan, perusahaan membebankannya sebagai HTI dalam pengembangan, karena belum ada produksi dan diakumulasi selama daur pertama. Biaya tersebut akan dikapitalisasi sebagai biaya ditangguhkan pada saat produksi dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi.

34. Perusahaan memasukkan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Bina Desa Hutan ke dalam HTI dalam pengembangan, karena belum ada produksi dan akan diamortisasi selama masa produksi sebagai biaya produksi.

h) Pembangunan sarana dan prasarana

35. Perusahaan telah memasukkan biaya pembangunan jalan induk dan jalan cabang sebagai aktiva tetap.

36. Perusahaan telah memasukkan biaya pembangunan jalan ranting sebagai HTI dalam pengembangan dan diamortisasi sebagai biaya produksi.

i) Beban Usaha

37. Perusahaan telah memasulkan Beban Umum dan Administrasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan sebagai Beban Umum dan Administrasi Direktorat Keuangan.

j) Beban Penghentian Usaha

38. Perusahaan akan memasukkan biaya pnghentian produksi yang disebabkan oleh kejadian normal dan rutin seperti keadaan cuaca ke dalam biaya produksi, saat ini peruahaan belum ada produksi



39. Perusahaan akan memasukkan biaya penghentian produksi lainnya seperti disebabkan oleh bencana alam atau kebakaran sebagai pos luar biasa, pada saat ini perusahaan belum ada produksi.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

40. Perusahaan telah mengungkapkan hal-hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan .

- a. Perusahaan tidak mengungkapkan realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanaman Indonesia karena Pola HTI berbeda dengan pola HPH. Perusahaan mengungkapkan pembinaan dan perlindungan hutan serta mengenai penanaman tanah kosong.
- b. Pengungkapan pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan.
- c. Pengungkapan rincian luas areal sisa hutan yang belum dikelola selama masa sisa manfaat HPH.
- d. Pengungkapan sisa umur HPH.
- e. Pengungkapan realisasi luas tanaman pada periode berjalan dan akumulasinya.
- f. Pengungkapan klasifikasi aktiva tetap dan peruntukannya.
- g. Pengungkapan susunan pemegang saham perusahaan serta penjelasan mengenai perubahan pemegang saham selama periode berjalan, dan pengungkapan rincian pendapatan operasional menurut jenis kegiatan.

- h. pengungkapan pemenuhan kewajiban terhadap negara seperti, DR, IHH, BPPHH, IHPH dan iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Pengungkapan sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan yang timbul akibat dari kegiatan perusahaan hutan.
- j. Pengungkapan realisasi jenis kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan dan biayanya.
- k. Pengungkapan sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana.
- l. Pengungkapan sehubungan dengan persediaan.

3. Kegiatan Perusahaan Hutan Tanaman industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PT. Belantara Persada.

Berikut ini akan disusun tabel kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri dan perlakuan akuntansinya berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan oleh perusahaan (Tabel 10: Kegiatan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Belantara Persada).

Pada saat ini perusahaan baru dalam tahap penanaman Atau daur pertama, sehingga akan tampak perbedaan antara tabel 9 dengan tabel 10. Tabel 9 akan menunjukkan kegiatan perusahaan dalam tahap produksi atau daur kedua, sedangkan pada tabel 10 akan menunjukkan kegiatan perusahaan dalam tahap penanaman. Perbedaan tersebut terlihat dalam HTI dalam pengembanga, biaya produksi dan Beban ditangguhkan, uraian lebih lanjut akan akan dibahas dalam pembahasan.

Tabel 11: Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PT. Belantara Persada

| Nama kegiatan | Rincian Kegiatan | Perlakuan Akuntansi | Kelompok Rekening dalam lap. Keu. | Laporan keuangan |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | |
| PERENCANAAN | Penyusunan Studi Kelayakan | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Usaha Perolehan HPHTI | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Penyusunan Rencana Karya Lima Tahunan | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | Penyusunan Rencana Karya Tahunan | HTI dalam Pengembangan | HPP | Laporan Rugi Laba |
| | | | | |
| PENANAMAN | Penanaman Hutan Alam | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| DALAM DAUR PERTAMA | Penanaman Hutan Lindung | Biaya Lain-lain | Biaya Lain-lain | Laporan Rugi Laba |
| | Penanaman Kembali Jalur Tebang | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Penanaman Tanah Kosong | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Penanaman Kiri-Kanan Jalan | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | <i>Landscaping</i> | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | Kegiatan Konversi Lainnya | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | | | | |
| PEMELIHARAAN DAN | Persemaian | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| PEMBINAAN HUTAN | Persiapan Lapangan | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| DAUR PERTAMA | Seleksi Pemindahan | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | | | | |
| | | | | |
| PENGENDALIAN | Pembangunan Menara Api | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| KEBAKARAN DAN | Pembangunan Pos Jaga | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| PENGAMANAN HUTAN | Pembuatan Hilaran Api | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | | | | |
| | | | | |

Lanjutan Tabel 11: Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perlakuan Akuntansinya Menurut PT. Belantara Persada

| Nama kegiatan | Rincian Kegiatan | Perlakuan Akuntansi | Kelompok Rekening dalam lap. Keu. | Laporan keuangan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | Premi Asuransi Kebakaran | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA | <u>Pemenuhan Kewajiban Teknis</u> | Beban Ditangguhkan | Aktiva Lain-lain | Neraca |
| | - AMDAL | | | |
| | - Penyajian Evaluasi Lingkungan | | | |
| | - Rencana Kelola Lingkungan | | | |
| | - Rencana Pemantauan Lingkungan | | | |
| | <u>Pemenuhan Kewajiban Finansial</u> | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| | - Pembayaran Iuran Hasil Hutan | | | |
| | - Pembayaran Pengukuran dan Pengujian HH | | | |
| | - Dana Reboisasi | | | |
| | - Pelunasan PBB Areal | | | |
| PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Studi Diagnostik Bina Desa Hutan | Beban Ditangguhkan | Aktiva lain-lain | Neraca |
| | Pelaksanaan Bina Desa Hutan | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |
| PEMBANGUNAN SARANA DAN PRSARANA | Pembangunan Jalan Induk | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| | Pembangunan Jalan Cabang | Aktiva Tetap | Aktiva Tetap | Neraca |
| | Pembangunan Jalan Ranting | HTI dalam Pengembangan | Aktiva | Neraca |

4. Perbandingan Laporan Keuangan PT. Belantara Persada Dengan PSAK No. 32 Berdasarkan Hasil Kuesioner.

Berikut ini akan diperbandingkan laporan keuangan PT. Balantara Persada dengan PSAK No. 32, perbandingan ini untuk mengetahui seberapa jauh PT. Belantara Persada menerapkannya.

Perbandingan berikut ini hanya dilakukan untuk unsur-unsur laporan keuangan bersifat khusus yang berkaitan dengan akuntansi kehutanan, unsur-unsur laporan keuangan lainnya mengacu pada akuntansi umum.

a. Neraca

Penyajian neraca oleh PT. Belantara Persada sudah sesuai dengan standar akuntansi kehutanan untuk unsur-unsur neraca yang bersifat khusus, sedangkan unsur-unsur lain telah mengacu pada akuntansi umum. Unsur-unsur neraca yang bersifat khusus adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Berdasarkan hasil kuesioner, catatan terhadap persediaan telah sesuai dengan PSAK No. 32. Persediaan meliputi tidak terbatas pada hasil tebangan, kayu olahan, suku cadang, bahan pembantu dan perlengkapan kantin, karena saat ini perusahaan belum memproduksi maka persediaan berupa kayu tebangan yang dapat ditemukan di TPN dan lokasi tidak tampak dalam laporan keuangannya. Perusahaan hanya mencatat persediaan berupa perlengkapan dan barang-barang kantin. Menurut hasil wawancara dan kuesioner

pencatatan hasil tebangan di masa akan datang oleh PT. Belantara Persada tidak akan menemui kesulitan, hal ini disebabkan peraturan untuk pencatatan persediaan telah cukup jelas dan telah masuk dalam perencanaan perusahaan.

2) HTI Dalam Pengembangan

Pencatatan HTI dalam pengembangan oleh PT. Belantara Persada telah sesuai dengan peraturan PSAK No. 32. Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan hutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan HTI disajikan secara terpisah dari biaya ditangguhkan, biaya-biaya yang termasuk dalam HTI dalam pengembangan dapat dilihat dalam tabel 9. Dalam perusahaan perusahaan hutan, Hutan Tanaman Industri yang telah menghasilkan akan dipindahkan dari akun HTI dalam pengembangan menjadi akun Hutan Tanaman Industri (HTI), akun HTI akan dikategorikan sebagai aktiva tetap.

Apabila diperbandingkan dengan tabel 10 akan tampak beberapa perbedaan dalam memasukkan pos-pos tertentu ke dalam HTI dalam pengembangan, perbedaan tersebut terletak pada biaya-biaya rincian kegiatan seperti penyusunan RKT, premi asuransi kebakaran, pemenuhan kewajiban finansial, pelaksanaan bina desa hutan dan pembangunan jalan ranting. Biaya-biaya tersebut perlakuan akuntansinya seharusnya masuk dalam biaya produksi tetapi oleh PT. Belantara Persada dimasukkan kedalam HTI dalam pengembangan.

Pencatatan tersebut oleh perusahaan tidak bertentangan dengan standar akuntansi. Dari definisi HTI bahwa hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hutan, maka dapat diketahui HTI baru akan menghasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. PT. Belantara Persada yang baru mulai menanam dan belum melakukan panen hasil HTI dapat dikategorikan sebagai perusahaan dalam tahap pengembangan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 6, tentang Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan Dalam Tahap Pengembangan, paragraf 02 dan 04:

- (02) Untuk mengidentifikasi perusahaan sebagai perusahaan dalam tahap pengembangan dalam pernyataan ini, diperlukan dua persyaratan:
 - (a) Perusahaan sedang mencurahkan semua kegiatan untuk mendirikan perusahaan baru; dan
 - (b) Memenuhi salah satu syarat dari dua syarat yang diuraikan dalam paragraf 04
- (04) Salah satu dari dua persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah:
 - (a) Kegiatan utama belum dimulai; atau
 - (b) Kegiatan utama sudah dimulai tetapi belum menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang material.

PT. Belantara Persada yang masih dalam tahap pengembangan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Biaya-biaya yang seharusnya masuk ke dalam biaya produksi tetapi karena belum ada produksi maka biaya-biaya tersebut ditangguhkan dan dimasukkan ke dalam HTI dalam pengembangan karena berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan hutan,

sebagaimana diatur dalam PSAK No. 6 paragraf 05, bahwa dalam pengakuan pendapatan maupun dalam menentukan apakah biaya dibukukan sebagai beban pada periode berjalan, atau ditangguhkan pembebanannya (dikapitalisasi) untuk disusutkan atau diamortisasi selama beberapa periode sesuai dengan pemulihan manfaatnya dimasa depan. Penangguhan pembebanan tersebut hanya terbatas pada biaya-biaya yang memiliki manfaat dimasa depan yang meliputi antara lain meliputi beban pendirian perusahaan. PT. Belantara Persada masih dalam tahap pengembangan maka biaya-biaya penyusunan RKT, premi asuransi kebakaran, pemenuhan kewajiban finansial, pelaksanaan bina desa hutan dan pembangunan jalan ranting dalam masa penanaman merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan pendirian perusahaan. Biaya-biaya tersebut oleh perusahaan ditangguhkan pembebanannya, penangguhan pembebanan masih relevan dengan standar akuntansi kehutanan dimana dalam keadaan tertentu perusahaan diperbolehkan mengacu pada standar akuntansi umum.

3) Beban Ditangguhkan

Beban ditangguhkan yang dicatat oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK No. 32. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan perusahaan hutan oleh PT. Belantara Persada yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti penyusunan studi kelayakan, usaha perolehan HPHTI, usaha perolehan HPHTI, pembayaran

Iuran HPH, penyusunan RKL, pembangunan menara api, pembangunan pos jaga, pembuatan hiaran api, pemenuhan kewajiban teknis dan studi diagnostik, dimasukkan dalam beban ditangguhkan. Pencatatan biaya-biaya tersebut ke dalam beban ditangguhkan sesuai dengan PSAK No. 16, tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, paragraf 55, mengenai jenis aktiva yang termasuk beban ditangguhkan atau aktiva lain-lain adalah pos-pos yang tidak secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap, dan juga tidak dapat dalam aktiva lancar, investasi atau penyertaan, maupun aktiva tidak berwujud, seperti aktiva tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang yang saham, beban ditangguhkan, piutang kepada pemegang saham, beban ditangguhkan dan aktiva lancar lainnya disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain atau beban yang ditagguhkan.

Perusahaan mencatat pembangunan menara api, pembangunan pos jaga dan pembuatan ilaran api sebagai beban yang ditangguhkan pada periode penanaman, saat pohon siap terbang atau produksi oleh perusahaan akan dipindah menjadi aktiva tetap. Pencatatan tersebut tidak bertentangan dengan standar akuntansi kehutanan dan standar akuntansi No. 16, biaya-biaya yang dikeluarkan yang dikeluarkan selama masa penanaman HTI dapat dikapitalisir sejalan dengan peraturan PSAK No. 16, tentang Aktiva Tetap Dan Aktiva Lain-lain, paragraf 56 dimana biaya yang tidak dilaporkan

sebagai beban pada periode terjadinya karena dapat dianggap memberikan manfaat bagi periode periode selanjutnya digolongkan sebagai beban yang ditangguhkan, termasuk didalamnya biaya pendirian perusahaan yang timbul pada perusahaan dalam tahap pengembangan. Perusahaan dalam tahap pengembangan kegiatan yang sedang mencurahkan semua kegiatannya untuk mendirikan usaha baru lazimnya meliputi aktivitas-aktivitas seperti pembelian atau pembangunan aktiva tetap (PSAK No.06, paragraf 03).

4) Kewajiban

Pencatatan kewajiban dan ekuitas oleh PT. Belantara Persada telah sesuai dengan PSAK No. 32. Kewajiban yang dicatat oleh perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan pembangunan hutan adalah kewajiban jangka panjang kredit Dana Reboisasi (DR). Pinjaman DR merupakan pinjaman yang dilakukan dalam rangka pembangunan HTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disebutkan bahwa dana yang diterima selain untuk penyertaan modal disajikan sebagai bagian dari keewajiban. Sesuai dengan ketentuan pinjaman DR dengan bunga 0% akan berkurang pada saat pengembalian DR termaksud, yaitu setelah pinjaman DR dengan bunga komersial dilunasi. Sementara itu, pinjaman DR dengan bunga komersial akan berkurang pada saat pengembalian DR termaksud, yaitu saat mulai terbangun pertama.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sampai tanggal pelaporan yang harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut belum diakui oleh peraturan perpajakan karena belum terjadi atau berbeda waktu pengakuannya, perusahaan mengakui adanya estimasi kewajiban sedangkan menurut peraturan perpajakan kewajiban tersebut baru diakui pada saat terjadinya, perusahaan sendiri tidak memiliki estimasi kewajiban. Apabila timbul estimasi kewajiban yang menyebabkan perbedaan laporan keuangan untuk perusahaan dan pajak, pihak perusahaan menyusun dua laporan keuangan, laporan keuangan untuk tujuan akuntansi yang dipergunakan oleh pihak perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan laporan keuangan untuk tujuan pajak untuk pemerintah sebagai penerima pajak. Dasar untuk menentukan apakah perusahaan telah menerapkan PSAK No. 32 atau belum adalah peraturan PSAK No. 32 dengan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan tersebut, bukan laporan keuangan yang dibuat untuk tujuan pajak berdasarkan peraturan perpajakan.

5) Ekuitas

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 32, perusahaan mencatat penyertaan dana yang diterima sebagai penyertaan modal disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Ekuitas perusahaan pengusahaan hutan adalah kekayaan bersih dalam seluruh aktiva setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban

perusahaan tersebut. Ekuitas ini digunakan untuk mencatat sumber dana yang menjadi hak pemilik dalam perusahaan perusahaan hutan. PT. Belantara Persada sendiri merupakan perusahaan patungan antara PT. Segara Timber dengan penyertaan modal sebesar 60% dan PT. Inhutani I dengan penyertaan modal sebesar 40%, dengan demikian PT. Belantara Persada dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Dari hasil analisis di atas, berikut di bawah ini disusun tabulasi untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan hasil penelitian dengan peraturan PSAK No. 32, untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan PSAK No. 32 atau belum.

Tabel 12: Perbandingan Laporan Keuangan PT. Belantara Persada dengan Peraturan PSAK No. 32

| No | Nama Rekening | Laporan Keuangan Menurut | |
|----|------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | PT. Belantara Persada | PSAK No. 32 |
| 1. | Persediaan | | ✓ |
| 2. | HTI dalam Pengembangan | | ✓ |
| 3. | Biaya Bunga Pinjaman | | ✓ |
| 4. | Beban yang Ditangguhkan | | ✓ |
| 5. | Kewajiban | | ✓ |
| 6. | Ekuitas | | ✓ |
| 7. | Harga Pokok Pejualan | | ✓ |
| 8. | Biaya Perencanaan | | |
| | - Penyusunan Studi Kelayakan | | ✓ |
| | - Usaha Perolehan HPHTI | | ✓ |
| | - Pembayaran Iuran HPH | | ✓ |
| | - Penyusunan RKPH | | ✓ |
| | - Penyusunan RKL | | ✓ |

**Lanjutan Tabel 12: Perbandingan Laporan Keuangan PT. Belantara Persada
dengan Peraturan PSAK No. 32**

| No | Nama Rekening | Laporan Keuangan Menurut | |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | PT. Belantara Persada | PSAK No. 32 |
| | - Penyusunan RKT | ✓ | |
| 9. | Biaya Penanaman dalam Daur Pertama | | ✓ |
| | - Penanaman Hutan Alam | | ✓ |
| | - Penanaman Hutan Lindung | | ✓ |
| | - Penanaman Kembali Jalur Tebang | | ✓ |
| | - Penanaman Tanah Kosong | | ✓ |
| | - Penanaman Kiri-Kanan Jalan | | ✓ |
| | - <i>Landscaping</i> | | ✓ |
| | - Kegiatan Konservasi Lainnya | | ✓ |
| 10. | Kegiatan Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan Daur Pertama | | |
| | - Persemaian | | ✓ |
| | - Persiapan Lapangan | | ✓ |
| | - Seleksi Pemandahan | | ✓ |
| 11. | Kegiatan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan | | |
| | - Pembangunan Menara Api | ✓ | |
| | - Pembangunan Pos Jaga | ✓ | |
| | - Pembuatan Ilaran Api | ✓ | |
| | - Premi Asuransi Kebakaran Hutan | ✓ | |
| 12. | Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara | | |
| | - Pemenuhan Kewajiban Teknis | | ✓ |
| | - Pemenuhan Kewajiban Finansial | | ✓ |
| 13. | Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan Sosial | | |
| | - Studi Diagnostik Bina Desa Hutan | | ✓ |
| | - Pelaksanaan Bina Desa Hutan | ✓ | |
| 14. | Pembangunan Sarana dan Prasarana | | |
| | - Pembangunan Jalan Induk | | ✓ |
| | - Pembangunan Jalan Cabang | | ✓ |
| | - Pembangunan Jalan Ranting | ✓ | |

Catatan Tabel 12:

Perbedaan yang terlihat pada tabel di atas bukan berarti menunjukkan adanya penyimpangan dari PSAK No. 32, melainkan disebabkan PT. Belantara Persada merupakan perusahaan yang tergolong perusahaan dalam tahap pengembangan. Selain itu, perbedaan tersebut juga dikarenakan adanya perbedaan pengoperasian dan manfaat yang diperoleh dari suatu aktiva, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

b. Laporan Rugi Laba**1) Pendapatan**

Pendapatan dari kegiatan utama perusahaan perusahaan hutan yaitu dari penjualan kayu tebangan belum diperoleh perusahaan, karena perusahaan belum ada produksi kayu tebangan. Berdasarkan hasil kuesioner pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No. 32, pendapatan telah diakui dengan menggunakan dasar akrual. Pendapatan perusahaan saat ini diperoleh dari pendapatan lain-lain meliputi seperti pendapatan bunga simpanan di bank.

2) Beban

Perusahaan belum mencatat adanya beban dari kegiatan utama karena perusahaan dalam tahap perkembangan, perusahaan belum mengeluarkan biaya produksi. Berdasarkan hasil kuesioner beban telah dicatat oleh perusahaan dengan menggunakan dasar akrual, berarti ini telah sesuai dengan PSAK No. 32. Beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan berasal dari beban lain-lain.

Beban yang timbul dari kewajiban yang belum dilaksanakan sampai pada tanggal pelaporan dan harus diestimasi, meliputi biaya penanaman, biaya pemeliharaan dan pembinaan hutan, dan biaya pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan belum diakui oleh peraturan perpajakan karena belum terjadi. Perusahaan sendiri tidak mencatat adanya pengeluaran beban-beban tersebut dan perusahaan tidak melakukan penunggakan pajak (*deffered tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Pembedaan laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak didasarkan pada tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan akuntansi untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, dan laporan keuangan untuk tujuan pajak untuk mengetahui besarnya laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Apabila tujuan laporan keuangan ditinjau dari aspek laba perusahaan, menurut konsep laba bersih, laba bersih bagi perusahaan adalah konsep laba bersih operasi. Biaya bunga pinjaman dan laba bagi pemegang saham umumnya bersifat keuangan. Pajak yang dikenakan atas perusahaan tidak memenuhi kedua aspek tersebut, dengan demikian laba bersih kena pajak dihitung dengan cara berbeda dengan laba bersih akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan. Penggunaan laba bersih setelah kena pajak untuk pengambilan keputusan dan prediksi tidak relevan.

c. Laporan Arus Kas

PSAK No. 32 tidak mengatur secara khusus mengenai laporan arus kas, laporan arus kas diatur secara umum dalam PSAK No. 2 tentang, Laporan Arus Kas, tidak ada hal-hal khusus dalam peraturan PSAK No. 2 sebagaimana PSAK No. 32. Perusahaan sendiri tidak mengalami kesulitan dalam penerapannya, dengan demikian PT. Belantara Persada telah menyusun laporan arus kas sesuai dengan peraturan PSAK No. 2.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan catatan atas laporan keuangan oleh PT. Belantara Persada telah sesuai dengan PSAK No. 32. Banyaknya catatan atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan dan keterbatasan ruang penulisan tidak semua catatan dapat diungkapkan disini, hal yang terpenting bagi penelitian ini adalah sudah atau belum perusahaan menerapkan peraturan PSAK No. 32 tentang catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini sebagian penjelasan dari catatan atas laporan keuangan PT. Belantara Persada.

- a. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan meliputi perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemenuhan kewajiban kepada negara, pemenuhan kewajiban kepada lingkungan sosial dan pembangunan sarana dan prasarana.

- b. Luas areal yang belum dikelola sampai tahun 1997 adalah seluas 9.126,7 Ha.
- c. Sisa Umur HPH sejak dikeluarkan pada tahun 1993 sampai tahun 1997 adalah 41 tahun. Umur HPH sendiri 45 tahun 10 tahun pertama untuk masa penanaman dan 35 sisanya untuk penebangan.
- d. Luas tanaman yang telah terealisasi sampai tahun 1997 adalah seluas 2.573,3 Ha.
- e. Aktiva tetap telah diklasifikasikan menurut peruntukannya seperti bangunan, jalan HTI, mesin-mesin, kendaraan, instalasi air dan inventaris kantor.
- f. Pemegang saham PT. Belantara Persada sampai dengan tahun 1997 adalah PT. Segara Timber dan PT. Inhutani I.
- g. Perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada negara baik kewajiban teknis maupun kewajiban finansial.
- h. Perusahaan telah mengungkapkan sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban yang timbul akibat dari kegiatan perusahaan hutan.
- i. Realisasi bina desa hutan seperti bantuan bibit padi gogo, bantuan pupuk dan obat-obatan.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan menara api, pembangunan pos jaga, pembuatan hilaran api, pembangunan barak staff, pembuatan jembatan dan pengadaan kendaraan.

- k. Pengungkapan persediaan berupa suku cadang, bahan pembantu dan perlengkapan barang-barang kantin.

C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Antara Laporan Keuangan PT. Belantara Persada dengan PSAK No. 32

1. Perbedaan Antara Laporan keuangan Perusahaan Dengan PSAK No. 32

Dari analisis data sebelumnya maka diketahui sedikit sekali perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan terhadap PSAK No.32. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat pada, yaitu:

- a. Dalam pengungkapan HTI dalam pengembangan perusahaan memasukkan biaya penyusunan RKT, premi asuransi kebakaran, pemenuhan kewajiban finansial, pelaksanaan bina desa hutan dan pembangunan jalan ranting ke dalam HTI dalam pengembangan. Biaya-biaya tersebut menurut peraturan PSAK No. 32 seharusnya dimasukkan sebagai biaya produksi, tetapi karena perusahaan belum berproduksi, masih dalam tahap pengembangan, maka perusahaan juga belum mencatat adanya biaya produksi yang harus dikeluarkan. Perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan biaya-biaya yang dikeluarkan adalah untuk investasi. Berdasarkan PSAK No. 6 biaya-biaya tersebut dapat ditunda pembebanannya sampai pada saat produksi, dan biaya-biaya tersebut akan diamortisir sebagai biaya produksi selama masa manfaatnya. Untuk lebih jelasnya lihat kembali halaman 103-105, 2) HTI dalam Pengembangan.

b. Perbedaan lain adalah dibandingkannya antara biaya untuk pembangunan menara api, pembangunan pos jaga dan pembuatan halaran api (pembangunan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan) dengan biaya untuk pembuatan jalan induk dan jalan cabang. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan aktiva dalam operasi perusahaan dan manfaat yang diperoleh pada suatu periode. Pembangunan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan belum digunakan dalam operasi perusahaan dan manfaat atau kenikmatan akan diperoleh pada saat tersedia pohon siap tebang atau produksi. Pada masa produksi sarana pembangunan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan akan dioperasikan oleh perusahaan untuk mencegah kebakaran dan pencurian pohon yang akan ditebang. Saat ini perusahaan masih dalam tahap penanaman maka biaya-biaya tersebut diakui sebagai beban yang ditangguhkan (aktiva lain-lain) sampai saat produksi, biaya-biaya tersebut akan diakui sebagai aktiva tetap. Sedangkan biaya-biaya pembangunan sarana dan prasarana langsung diakui sebagai aktiva tetap, karena perusahaan dalam mewujudkan operasinya harus membuat jalan induk dan jalan cabang yang untuk menunjang kelangsungan operasi perusahaan, kegiatan operasi perusahaan sendiri telah dimulai sejak perusahaan masih dalam tahap pengembangan. Jalan HTI bagi perusahaan memiliki manfaat bagi operasi perusahaan sejak periode penanaman sampai periode produksi.

2. Persamaan Antara Laporan Keuangan Perusahaan Dengan PSAK No. 32

PT. Belantara Persada dalam penyusunan laporan keuangan untuk neraca, laporan rugi-laba dan catatan atas laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK No. 32. Sedangkan untuk laporan arus kas diatur secara umum untuk semua jenis perusahaan dalam PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas. Perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan PSAK No. 2 karena tidak berisi peraturan-peraturan khusus sebagaimana dalam peraturan PSAK No. 32.

Dengan banyaknya kesamaan antara laporan keuangan perusahaan dengan PSAK No. 32, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PSAK No. 32 guna penyeragaman laporan keuangan untuk perusahaan perusahaan hutan dapat diterapkan dengan baik oleh PT. Belantara Persada.

D. Deskripsi dan Analisis Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Perusahaan Dalam Menerapkan PSAK No. 32

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staff akuntansi maka dapat diketahui bahwa dalam menerapkan PSAK No. 32 pihak perusahaan tidak menemui adanya hambatan-hambatan. Dapat diterapkannya PSAK No. 32 dengan baik oleh perusahaan karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. PT. Belantara Persada merupakan perusahaan patungan antara PT. Segara Timber dan PT. Inhutani I, PT. Segara Timber merupakan perusahaan pengolahan kayu pemegang HPH. Staf PT. Segara Timber yang telah berpengalaman dalam penyusunan laporan keuangan untuk kehutanan banyak diperbantukan pada PT. Belantara Persada. Saat PSAK No. 32 dikeluarkan staf akuntansi tidak mengalami kesulitan dalam mempelajarinya dan menerapkannya.
2. PT. Inhutani I yang juga merupakan pemegang saham PT. Belantara Persada memiliki standar tersendiri yang harus diikuti oleh staf akuntansi. Standar akuntansi yang dikeluarkan oleh PT. Inhutani I memiliki banyak kesamaan dengan PSAK No. 32 banyaknya kesamaan sangat membantu dalam menerapkan peraturan yang tertuang dalam PSAK No. 32.
3. Staf akuntansi PT. Belantara Persada telah mendapat pelatihan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 32. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pegusahaan Hutan, Departemen kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
4. Dikeluarkannya pedoman pelaporan keuangan perusahaan hutan bagi perusahaan perusahaan hutan, pedoman ini dikeluarkan agar terdapat keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan baik pemegang HPH dan HPHTI sesuai dengan tujuan PSAK No. 32.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Atas dasar data yang diperoleh dari PT. Belantara Persada dan dianalisis dengan teknik deskripsi data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Belantara Persada telah menerapkan PSAK No. 32 dengan baik. walaupun terdapat sedikit perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dengan PSAK No. 32. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pengambilan kebijakan oleh perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 32 bagi perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan, dan perbedaan waktu pengoperasian dan manfaat yang akan diperoleh dari suatu aktiva yang dibangun. Perbedaan ini tidaklah berarti perusahaan tidak mampu menerapkan PSAK No. 32, melainkan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam standar akuntansi yang lain seperti misalnya PSAK No. 6 dan PSAK No.16 karena saling berkaitan dengan PSAK No. 32. PSAK No. 32 sendiri sedikit sekali membahas untuk perusahaan dalam tahap pengembangan karena telah dijelaskan dalam peraturan standar akuntansi untuk perusahaan dalam tahap pengembangan.
2. Dalam menerapkan PSAK No. 32 perusahaan tidak mengalami hambatan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan hutan bagi perusahaan pemegang HPHTI.

3. Perusahaan membuat dua laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dipergunakan oleh pihak intern maupun ekstern dalam pengambilan kebijakan, sedangkan laporan keuangan untuk tujuan pajak digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
4. Adanya pos-pos tertentu yang belum diperkenankan oleh pajak karena adanya perbedaan waktu pengakuan, seperti beban yang timbul akibat dari estimasi kewajiban. Perusahaan sendiri tidak mencatat adanya estimasi kewajiban.
5. Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi kehutanan (PSAK No. 32) dalam laporan keuangannya dengan baik, walaupun ada beberapa bagian yang mengikuti standar akuntansi keuangan yang lain seperti misalnya Kerangka Dasar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 6, 16, dan 23 karena saling berkaitan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian adalah tidak semua data dapat diperoleh dengan lengkap, perusahaan tempat penelitian memiliki kebijakan tersendiri untuk yang akan diberikan yang merupakan rahasia perusahaan.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain, yaitu:

1. Tidak diberikannya data untuk laporan keuangan untuk pajak, Peneliti hanya memperoleh sedikit gambaran dari hasil wawancara mengenai pos-pos tertentu yang belum diperkenankan peraturan pajak. Perbedaan tersebut akibat perbedaan waktu pengakuan oleh peraturan pajak dan akuntansi. Untuk itu peneliti tidak

membahas secara khusus mengenai pajak karena yang menjadi acuan adalah peraturan PSAK No. 32.

2. Laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan hanya satu periode saja, yaitu laporan keuangan tahun 1997. Peneliti tidak dapat mengetahui perkembangan penyusunan laporan keuangan dari perusahaan berdiri sampai tahun 1997, keterangan yang diperoleh bahwa laporan keuangan yang disusun dari awal sampai 1997 tetap sama dan telah mengikuti PSAK No. 32.
3. Peneliti tidak dapat memuat secara menyeluruh mengenai catatan atas laporan keuangan, hal ini disebabkan karena banyaknya catatan atas laporan keuangan dan keterbatasan ruang penulisan serta perusahaan hanya bisa memberikan sedikit keterangan karena menyangkut rahasia perusahaan. Peneliti hanya mampu memberikan sedikit keterangan tentang catatan atas laporan keuangan.

C. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini masih dapat ditindak lanjuti terutama untuk perusahaan pemegang HPHTI yang telah menjalani masa produksi, ini dilakukan untuk mengetahui lebih lengkap laporan keuangan perusahaan yang telah berproduksi, termasuk perkembangan laporan keuangan yang disusun sejak awal berdiri. Hal lain yang dapat diteliti adalah mengenai pengaruh pajak terhadap

laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan. Setiap penelitian pada perusahaan yang berbeda akan menghasilkan jawaban yang berbeda pula karena setiap perusahaan memiliki karakteristik tersendiri.

2. Bagi perusahaan, PT. Belantara Persada telah menerapkan PSAK No. 32 dengan baik sehingga tidak banyak saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Hal yang perlu diperhatikan adalah detail dari pos-pos dalam laporan keuangan, meliputi seperti misalnya persediaan, perusahaan tidak menjelaskan persediaan tersebut berupa apa saja, karena persediaan tersebut tidak terbatas pada kayu tebangan, kayu olahan dan hasil hutan lainnya. Pemberian penjelasan persediaan apa saja yang terkandung didalamnya beserta nilainya akan sangat membantu pemakai laporan keuangan, walaupun perusahaan telah memberikan keterangan tersebut pada catatan atas laporan keuangan. Dengan pemberian detail beserta nilai yang terkandung didalamnya akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
3. Bagi PSAK No. 32, Pernyataan Standar Akuntansi untuk kehutanan masih bersifat umum bagi perusahaan. PSAK No. 32 harus memisahkan lebih spesifik antara perusahaan pemegang HPH dan pemegang HPHTI. Khusus pemegang HPHTI harus dipisahkan antara perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan dengan perusahaan yang telah produksi. Pemisahan ini dilakukan agar pembaca PSAK No. 32 baik dari kalangan akademisi dan praktisi lebih mudah memahami apa yang yang dimaksud dengan perusahaan pengusahaan hutan, baik pemegang HPH maupun pemegang HPHTI.



DAFTAR PUSTAKA

- Dumairy (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan R.I., Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Laporan Akhir: Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan.
- Himpunan Peraturan Prundang-undangan Republik Indonesia tahun 1989. Undang-undang No. 5 tahun 1967. *Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*. Jakarta: PT. Ichtiar Banu Van Hoeve.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1990. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1990. *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1990. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1990. *Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Harahap, Sofyan Syafri (1997). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1 Oktober 1994. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pamulardi, Bambang (1996). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang kehutanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiri, Slamet. (1995). *Pengantar Akuntansi 1*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

LAMPIRAN

ISTILAH-ISTILAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGUSAHAAN HUTAN

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH)

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan dalam rangka mencapai optimalisasi pemanfaatan hasil hutan yang meliputi penetapan jenis, penetapan ukuran (volume atau berat) dan penetapan-kualitas hasil hutan.

Beban Penghentian Produksi

Dalam kegiatan perusahaan hutan, penghentian produksi adalah hal yang lazim terjadi, penghentian produksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti karena:

Cuaca atau Musim

Keadaan cuaca atau musim tertentu menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan pemungutan hasil hutan, namun biaya produksi tertentu harus dibebankan. Beban penghentian produksi seperti yang disebabkan oleh keadaan cuaca atau musim, dibukukan sebagai biaya produksi. Beban penghentian produksi lainnya seperti yang disebabkan oleh bencana alam atau kebakaran, disajikan sebagai pos luar biasa.

Dana Reboisasi (DR)

Dana yang dipungut dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Ijin Pemanfaatan Kayu, dalam rangka reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Rehabilitasi Lahan Hutan.

Hutan

Suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Hak untuk mengusahakan hutan dalam suatu kawasan hutan yang kegiatan-kegiatannya penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

Hutan Tanaman Industri (HTI)

Hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvilkultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Iuran Hasil Hutan (IHH)

Pungutan yang dikenakan sebagai pengganti sebagian nilai instrinsik daripada hasil hutan yang dipungut.

Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)

Pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu, pungutan-pungutan mana dilakukan hanya sekali pada saat hak tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH)

Industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfataannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Log Pond Antara

Tempat penimbunan air.

Pemegang HPH

Badan hukum Indonesia yang diberi HPH oleh Menteri Kehutanan.

Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

Telaah secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, zona lingkungan te tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut, dan rencana kegiatan pengendalian dampak negatifnya.

Perencanaan Hutan

Penyusunan pola tentang peruntukkan, penyediaan pengadaan dan penggunaan hutan serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu.

Persediaan

Persediaan meliputi tetapi tidak terbatas pada hasil tebangan, kayu olahan, barang dalam proses, suku cadang (*spare parts*), bahan pembantu dan perlengkapan. Hasil tebangan atau kayu bundar (*logs*) biasanya ditemukan di tiga lokasi, yaitu lokasi tebangan (TPN), lokasi pengumpulan atau penimbunan hasil hutan (log pond atau log pond antara atau log pond yard) dan log pond industri (IPKH). Hasil hutan yang telah di-TPN dan lokasi pengumpulan atau penimbunan hasil hutan harus dibukukan sebagai persediaan.

Perlindungan Hutan

Usaha pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan dari erosi, kebakaran, pencurian, perambahan, hama atau penyakit serta pencegahan kemusnahan flora dan fauna.

Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup bina desa hutan atau Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik bina desa hutan atau PMDH dibukukan sebagai beban ditanggungkan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Sedangkan biaya yang

berhubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan atau PHDH dibebankan sebagai biaya produksi.

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana meliputi tetapi tidak terbatas pada, pembuatan base camp, jalan induk, jalan cabang dan jalan ranting. Pengertian jalan induk, jalan cabang dan jalan ranting adalah pengertian yang bertahap atau hirarkis. Dengan kata lain, tidak ada jalan cabang tanpa adanya jalan induk, dan tidak ada jalan ranting tanpa adanya jalan cabang. Biaya-biaya pembangunan jalan induk dan jalan cabang dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya dibebankan sebagai biaya produksi sedangkan biaya pembangunan jalan ranting dibebankan sebagai biaya produksi.

Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKLPH)

Jabaran, penyesuaian dan pemantapan lima tahunan dari Rencana Karya Pengusahaan Hutan.

Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan

Rencana yang berisi pedoman dan arahan serta filosofi perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan menyajikan data, analisis dan prospek perusahaan serta rencana-rencana kegiatan penataan batas dan pengukuhan, penataan hutan dan pembukaan wilayah, inventarisasi hutan, pemungutan, penanaman, pemeliharaan, pemuliaan, pemasaran hasil hutan, perlindungan, konservasi.

pembinaan masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan digunakan untuk menyusun rencana yang lebih pendek jangka waktunya.

Silvikultur

Cara-cara penyelesaian dan pemeliharaan hutan, penerapan teori dan praktik-praktik pengaturan dan komposisi hutan.

Sistem Penyangga Kehidupan

Suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

SK.HPH/*Forestry Agreement* (F.A)

Ijin beserta ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menteri Pertanian untuk melaksanakan pengusahaan hutan atau suatu areal kerja pengusahaan hutan.

Studi Diagnostik

Kegiatan indentifikasi yang mencakup seluruh potensi, kondisi, aspirasi dan tata nilai masyarakat serta potensi sumber daya alam sebagai bahan dalam menyusun rencana pembinaan masyarakat desa hutan.

Studi Evaluasi Mengenai Analisa Dampak Lingkungan (SEMDAL)

Hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan yang sedang berjalan dan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SK.HPHTI)

Ijin beserta ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan atau Koperasi untuk mengusahakan Hutan Tanaman Industri.

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

Sistem silvilkultur, meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.

Tempat Pengumpulan Kayu (TPN)

Tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar tempat tebang yang bersangkutan.

Tempat Penimbunan Kayu Industri Pengolahan Kayu Hulu (Log Pond Industri)

Tempat penimbunan kayu di industri pengolahan kayu hulu yang mempunyai fungsi menerima, menimbun dan mengeluarkan kayu bulat dan atau bahan baku serpih di industri yang bersangkutan. (Kep.Men.Hut.402/Kpts-IV/90)

PEDOMAN WAWANCARA

I. Gambaran Umum Perusahaan

A. Sejarah singkat:

1. Kapan perusahaan berdiri?
2. Perusahaan didirikan oleh siapa?
3. Apa tujuan didirikannya perusahaan?
4. Apa visi dan misi perusahaan?
5. Berapa nomor akte pendirian perusahaan?
6. Siapa yang mengesahkan akte perusahaan tersebut?
7. Kapan pelaksanaan pembangunan HTI mulai dilaksanakan?
8. Kapan perusahaan mulai beroperasi?
9. Apakah perusahaan mempunyai mitra kerjasama?
10. Ada berapa banyak mitra perusahaan?

B. Lokasi perusahaan:

1. Apa yang mendasari pemilihan lokasi perusahaan?
2. Berapa luas lahan yang dimiliki oleh perusahaan?
3. Apa ada ijin khusus untuk pengolahan lahan tersebut?
4. Siapa yang memberi ijin atas penggunaan lahan tersebut?
5. Kapan dikeluarkannya ijin tersebut?

C. Bentuk perusahaan:

1. Apa bentuk perusahaan?
2. Jika perusahaan berbentuk PT, apakah perusahaan akan atau sudah go public dan kapan dimulainya?
3. Siapa yang bertanggungjawab terhadap perusahaan?

II. Personalia

A. Masalah tenaga kerja:

1. Berapa jumlah tenaga kerja perusahaan?
2. Berapa tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita?
3. Berdasarkan tempat tenaga kerja dibagi menjadi berapa?
4. Bagaimana klasifikasi pendidikan tenaga kerja?
5. Bagaimana tanggungjawab perusahaan terhadap keselamatan tenaga kerja?
6. Bagaimana Perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja?

B. Struktur organisasi:

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?
2. Bagaimana susunan pimpinannya?
3. Bagian apa saja yang ada didalam perusahaan?
4. Bagaimana tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dalam organisasi?

C. Administrasi:

1. Bagaimana sistem pengupahan perusahaan?

2. Berapa upah dan gaji para tenaga kerja?
3. Apakah ada standar yang digunakan dalam pemberian upah yang diterapkan perusahaan?
4. Apakah ada upah lembur bagi tenaga kerja?

D. Fasilitas-fasilitas:

1. Tunjangan-tunjangan apa saja yang diberikan perusahaan kepada karyawan?
2. Apakah ada organisasi tersendiri yang mengatur dan mengelola tunjangan dan kesejahteraan tenaga kerja?

III. Produksi

1. Dari mana perusahaan memperoleh bibit?
2. Apakah bibit diperoleh dari tempat milik sendiri dan atau kerjasama dengan perusahaan lain?
3. Tanaman apa saja yang diproduksi oleh perusahaan?

IV. Pemasaran

1. Daerah mana saja perusahaan memasarkan produknya?
2. Bagaimana cara perusahaan menjual produknya?
3. Bagaimana metode perusahaan menetapkan harga?
4. Bagaimana cara pendistribusiannya?

V. Akuntansi dan keuangan

A. Keuangan Perusahaan:

1. Bagaimana struktur modal perusahaan?
2. Bagaimana struktur kekayaan perusahaan?
3. Apakah ada pemisahan antara modal sendiri dengan modal yang berasal dari luar?

B. Akuntansi perusahaan:

1. Apakah perusahaan sudah menerapkan PSAK No. 32 dalam penyusunan laporan keuangan?
2. Jika belum menerapkan, apa alasannya?
3. Jika sudah menerapkan, sejak kapan perusahaan menerapkannya?
4. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh perusahaan?
5. Hambatan-hambatan tersebut berupa apa saja?
6. Bagaimana perusahaan mengatasi hambatan hambatan tersebut?
7. Apa manfaat penerapan PSAK No. 32 bagi perusahaan?
8. Apakah ada perbedaan laba yang dihasilkan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 32?
9. Apakah informasi yang dihasilkan ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menerapkan PSAK No. 32?
10. Mana yang lebih baik bagi pengambilan keputusan?

KUESIONER

Berilah tanda silang pada jawaban yang dianggap paling sesuai dan berilah alasan!

Laporan Keuangan

Neraca

Berhubungan dengan Aktiva:

1. Apakah aktiva dalam neraca telah dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar? () ya, () tidak, alasan.....
2. Apakah Aktiva telah diklasifikasikan menurut urutan likuiditas?() ya, () tidak, alasan.....
3. Apakah hasil hutan yang telah berada di TPN dan lokasi pengumpulan atau penimbunan hasil hutan telah dibukukan sebagai persediaan?() ya, () tidak, alasan.....
4. Apakah perusahaan pengusahaan hutan yang melaksanakan beberapa kegiatan pengusahaan hutan termasuk HTI, telah menyajikan biaya yang ditangguhkan dalam pelaksanaan pembangunan HTI terpisah dari biaya ditangguhkan lainnya dalam akun tersendiri yaitu “HTI dalam Pengembangan”? () ya, () tidak, alasan.....
5. Apakah akun HTI dalam Pengembangan telah disajikan di Neraca setelah Aktiva Lancar dan sebelum Aktiva Tetap? () ya, () tidak, alasan.....

6. Apakah biaya bunga pinjaman yang terjadi telah dikapitalisasi selama masa satu daur sebagai HTI dalam Pengembangan dan diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi? () ya, () tidak, alasan.....
7. Apakah biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan pengusahaan hutan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti biaya perolehan HPH termasuk IHPH, biaya penyusunan RKPH dan RKL dan biaya yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, dibukukan sebagai biaya ditangguhkan, dan diamortisasi sesuai taksiran masa manfaatnya? () ya, () tidak, alasan.....

Berhubungan dengan Kewajiban dan Ekuitas:

8. Apakah Kewajiban dalam neraca telah dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar? () ya, () tidak, alasan.....
9. Apakah Kewajiban telah telah diklasifikasikan menurut urutan likuiditas? () ya, () tidak, alasan.....
10. Apakah dana yang diterima perusahaan selain untuk penyertaan Modal disajikan sebagai bagian Kewajiban? () ya, () tidak, alasan.....
11. Apakah taksiran sisa kewajiban sehubungan dengan kewajiban penanaman kembali TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kembali, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, bina desa hutan, *landscaping* dan upaya konversi lainnya yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban? () ya, () tidak, alasan.....

12. Apakah dana yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal disajikan sebagai bagian Ekuitas? () ya, () tidak, alasan.....

Rugi Laba

Berhubungan dengan Pendapatan dan Beban:

13. Apakah pendapatan telah diakui dengan menggunakan dasar akrual? () ya, () tidak, alasan.....

14. Apakah pendapat operasional meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan maupun hasil hutan lainnya? () ya, () tidak, alasan.....

15. Apakah Harga Pokok Penjualan disajikan secara masing-masing untuk kayu tebangan dan kayu olahan secara terpisah? () ya, () tidak, alasan.....

16. Apakah beban telah diakui dengan menggunakan dasar akrual? () ya, () tidak, alasan.....

Berkaitan dengan Harga Pokok Produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti:

Perencanaan

17. Apakah biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan, termasuk IHPH, biaya penyusunan RKPH dan RKL telah direkapitulasikan secara terpisah sebagai beban ditanggungkan dan diamortisasikan selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

18. Apakah biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT telah dimasukkan sebagai biaya produksi dalam periode berjalan. () ya, () tidak, alasan.....

Penanaman

19. Apakah biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam telah dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. () ya, () tidak, alasan.....

20. Apakah biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman bukan untuk diproduksi, misalnya penanaman hutan lindung telah disajikan sebagai biaya beban lain-lain. () ya, () tidak, alasan.....

21. Apakah biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan perusahaan hutan seperti biaya penanaman kembali jalur tebang yang telah diproduksi, biaya penanaman tanah kosong dan kiri kanan jalan, landscaping dan biaya untuk usaha konservasi lainnya telah diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi walaupun kegiatan belum dilaksanakan () ya, () tidak, alasan.....

22. Pada HTI, jika tidak tersedia pohon siap tebang, apakah biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman telah dikapitulasi sebagai HTI dalam pengembangan. () ya, () tidak, alasan.....

23. Pada HTI, jika tersedia pohon siap tebang biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman telah dibukukan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

24. Apakah biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan telah dibebankan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

.....

25. Pada HTI, jika tidak tersedia pohon siap tebang, apakah biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pembinaan hutan dikapitalisasi sebagai HTI dalam pengembangan. () ya, () tidak, alasan.....

26. Pada HTI, jika terdapat pohon siap tebang yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan telah dibebankan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

Pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan

27. Apakah pembangunan dan atau pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan telah dikapitalisasi sebagai biaya ditanggungkan dan disusutkan selama manfaat maksimum sampai akhir masa konsesi. () ya, () tidak, alasan.....

28. Apakah biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan telah dibebankan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

29. Apakah kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan yang belum dilaksanakan pada tanggal neraca telah diestimasi

dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban. () ya, () tidak, alasan.....

.....

Pemungutan hasil hutan

30. Apakah biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan telah dibebankan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

Pemenuhan kewajiban terhadap negara

31. Apakah biaya yang berhubungan dengan penyusunan AMDAL, RPL, RKL, telah dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

32. Apakah biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial yang telah ditetapkan pemerintah seperti IHH, DR, BPPHH dan PBB areal, telah dibebankan sebagai biaya produksi dengan dasar akrual. () ya, () tidak, alasan.....

Pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial

33. Apakah biaya yang berhubungan dengan studi dianostik bina desa hutan atau PMDH dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

34. Apakah biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Bina Desa Hutan atau PMDH dibebankan sebagai biaya produksi? () ya, () tidak, alasan.....

Pembangunan sarana dan prasarana

35. Apakah biaya pembangunan jalan induk dan cabang telah dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaat dan dibukukan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

36. Apakah biaya pembangunan jalan ranting telah dibebankan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

Beban Usaha

37. Pada Hutan Tanaman Industri apakah Beban umum dan Administrasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan dibukukan sebagai Beban Umum dan Administrasi? () ya, () tidak, alasan.....

Beban Penghentian Usaha

38. Apakah beban penghentian produksi yang disebabkan oleh kejadian normal dan rutin seperti keadaan cuaca telah dibukukan sebagai biaya produksi. () ya, () tidak, alasan.....

39. Apakah beban penghentian produksi lainnya seperti disebabkan oleh bencana alam atau kebakaran telah disajikan sebagai pos luar biasa. () ya, () tidak, alasan.....

Catatan atas Laporan Keuangan

40. Apakah perusahaan telah mengungkapkan hal-hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangannya?

- a. Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
() ya, () tidak, alasan
 - pembinaan dan perlindungan hutan () ya, () tidak, alasan.....
 - penanaman tanah kosong () ya, () tidak, alasan.....
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan. () ya, () tidak, alasan.....
 - c. Rincian luas areal sisa hutan yang belum dikelola selama sisa masa manfaat HPH. () ya, () tidak, alasan.....
 - d. Sisa umur HPH. () ya, () tidak, alasan.....
 - e. Klasifikasi aktiva tetap dan peruntukannya. () ya, () tidak, alasan.....
 - f. Khusus untuk HTI, diungkapkan realisasi luas tanaman pada periode berjalan dan akumulasinya. () ya, () tidak, alasan.....
 - g. Susunan pemegang saham perusahaan serta penjelasan mengenai perubahan pemegang saham selama periode berjalan. () ya, () tidak, alasan.....
- Rincian pendapatan operasional dirinci menurut jenis kegiatan () ya, tidak (), alasan.....

- h. Pemenuhan kewajiban terhadap negara seperti, DR, IHH, BPPHH, IHPH, dan iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. () ya, () tidak, alasan.....
- i. Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan yang timbul akibat dari kegiatan perusahaan hutan, seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya yaitu pengungkapan tentang saldo awal kewajiban, penyisihan periode berjalan, realisasi yang dilakukan selama periode berjalan, dan saldo akhir. () ya, () tidak, alasan.....
- j. Realisasi jenis kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan dan biayanya () ya, () tidak, alasan.....
- k. Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka terdapat pengungkapan realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya, jenis jalan yang dibangun pada periode berjalan dan akumulasinya. () ya, () tidak, alasan.....
- l. Sehubungan dengan persediaan maka terdapat pengungkapan sebagai berikut dasar penentuan harga pokok persediaan, persediaan dikelompokkan antara lain berdasarkan kayu bulat, kayu olahan, barang dalam proses dan perlengkapan barang gudang berupa bahan bakar, suku cadang dan lain-lain pada tanggal pelaporan. () ya, () tidak, alasan.....



PT. BELANTARA PERSADA

SAMARINDA HEAD OFFICE
Jalan Gajah Mada 19
Phone : (0541) 33272, 33449 PO.Box. 1038
Fax : (0541) 41371
Telex : 38212 SEGARA IA
Cable : Segaraco Samarinda
Banker Bank Pembangunan Indonesia

JAKARTA OFFICE
Mangala Wanabakti Building :
Block IV, Wing A, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto Senayan
Phone : (021) 5701144 - 5734342
Fax : (021) 5732029
Telex : 65362 SEGARA IA
Cable : Goodwood

SURAT KETERANGAN

Nomor : 246 / BP / X / 1999

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : B. S. SUBA
Jabatan : Direktur Utama

Menerangkan bahwa saudara :

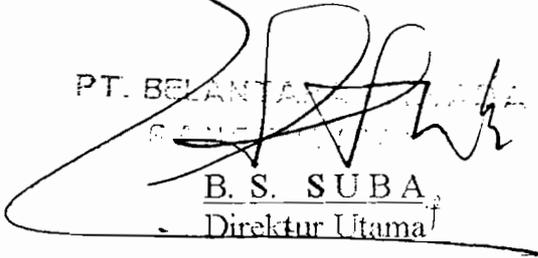
Nama : M. MARINIER ABRAHAM
NIM : 932114039
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Sanata Dharma



Telah selesai mengadakan penelitian pada perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Samarinda, 4 Oktober 1999

PT. BELANTARA PERSADA
Gajah Mada 19
Samarinda

B. S. SUBA
Direktur Utama